EFEKTIVITAS BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) ACEH TERHADAP PENGAWASAN BAHAN MAKAN YANG MENGANDUNG FORMALIN DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan oleh;

INTAN TARISA
NIM 220802075

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY BANDA ACEH

TAHUN 2026

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Intan Tarisa
NIM	: 220802075
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah
Tempat/Tanggal Lahir	: Dham Pulo, 4 Oktober 2003
Alamat	: Jln,Teungku Cot Malem, Dham Pulo Kab. Aceh Besar, Kec. Ingin Jaya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Mei 2026

INTAN TARISA

NIM. 220802075

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

EFEKTIVITAS BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) ACEH TERHADAP PENGAWASAN BAHAN MAKAN YANG MENGANDUNG FORMALIN DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Program Studi Ilmu Administrasi

Oleh:

INTAN TARISA
NIM. 220802075

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk di munaqasyahkan oleh:

Pembimbing

Dr. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed
NIP. 197810162008011011

جامعة الرانري
AR-RANIRY

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH

EFEKTIVITAS BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) ACEH TERHADAP PENGAWASAN BAHAN MAKAN YANG MENGANDUNG FORMALIN DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

INTAN TARISA
NIM.220802075

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara
Pada Hari/ Tanggal : Selasa, 12 Mei 2026 M
26 Dzulqaidah 1447 H

Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua	Sekretaris
Dr.Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed	**Evi Yusnaini, S.A.P.**
NIP. 197810162008011011	

Penguji I	Penguji II
Eka Januar, M.Soc,sc	**Putri Marzaniar, MPA.**
NIP.19840 012015031003	NIP. 198905182023211032

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof.Dr.Muji Mulia,S.Ag.,M.Ag.
NIP.197403271999031005

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala curahan rahmat, nikmat kesehatan, serta kesempatan yang dianugerahkan, sehingga penulis mampu merampungkan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul "EFEKTIVITAS BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) ACEH TERHADAP PENGAWASAN BAHAN MAKAN YANG MENGANDUNG FORMALIN DI KOTA BANDA ACEH" Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu prasyarat akademik yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, baik yang berkaitan dengan aspek keilmuan, pengalaman empiris, maupun kapasitas analitis yang dimiliki. Meskipun demikian, melalui dukungan, arahan, serta bimbingan konstruktif dari berbagai pihak, skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan secara optimal. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan apresiasi yang tulus, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., M.PA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Zakki Fuad Khalil, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

5. Dr. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BBPOM) Aceh atas bantuan, keterbukaan informasi, dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian/praktik kerja/penyusunan laporan ini berlangsung.
7. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada para pedangan di pasar yang telah memberikan izin penelitian serta memfasilitasi penulis dalam perolehan data yang diperlukan dengan sangat baik.
8. Terima kasih kepada keluarga terutama orang tua dan kakak serta sahabat yang selalu hadir, baik dalam doa maupun semangat, serta menjadi tempat berbagi keluh kesah selama proses penyelesaian skripsi ini.

Banda Aceh, 24 April 2026
Penulis

INTAN TARISA
NIM. 220802075

ABSTRAK

EFEKTIVITAS BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) ACEH TERHADAP PENGAWASAN BAHAN MAKAN YANG MENGANDUNG FORMALIN DI KOTA BANDA ACEH

Nama Mahasiswa / NIM	**Intan Tarisa / 220802075**
Program Studi	**Ilmu Administrasi Negara**
Topik	**Efektivitas Pengawasan BBPOM Aceh terhadap Bahan Makan yang Mengandung Formalin di Kota Banda Aceh**
Tanggal Pengajuan	**5 Mei 2026**

Abstrak

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam tingkat efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh terhadap peredaran bahan pangan yang terindikasi mengandung formalin di wilayah Kota Banda Aceh. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain naratif sebagai kerangka analisis. Proses penghimpunan data dilaksanakan melalui teknik wawancara, observasi lapangan, serta penelaahan dokumen. Selanjutnya, data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian secara sistematis, hingga penarikan inferensi sebagai kesimpulan akhir. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh BBPOM Aceh berada pada kategori relatif efektif. Indikator tersebut tercermin dari realisasi capaian target pengawasan yang melampaui angka 100%, disertai dengan sangat minimnya bahkan nihil temuan kandungan formalin pada bahan pangan sepanjang tahun 2025. Tingkat efektivitas ini ditopang oleh implementasi pengawasan berkala, pemanfaatan rapid test di lapangan, dukungan laboratorium yang telah terakreditasi, serta pelaksanaan kegiatan sosialisasi baik secara tatap muka maupun melalui platform digital. Kendati demikian, efektivitas tersebut belum mencapai kondisi optimal secara menyeluruh. Sejumlah hambatan masih dihadapi, di antaranya keterbatasan kuantitas dan distribusi sumber daya manusia, belum terpenuhinya standar sarana dan prasarana laboratorium secara komprehensif, cakupan wilayah pengawasan yang luas, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.

Kata kunci: ***Efektivitas BBPOM Aceh, Pengawasan, Bahan Makan***

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ii
PENGESAHAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN SIDANG iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar belakang masalah 1
1.2 Identifikasi Masalah 9
1.3 Rumusan Masalah 9
1.4 Tujuan Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
2.1 Penelitian Terdahulu 11
2.2 Landasan Teori 13
2.3 Peredaran 21
2.4 Makanan 22
2.5 Kerangka Berpikir 29
BAB III METODE PENELITIAN 30
3.1 Pendekatan Penelitian 30
3.2 Fokus Penelitian 30
3.3 Lokasi Penelitian 31
3.4 Informan Penelitian 31
3.5 Jenis dan Sumber Data 33

3.6 Teknik Pengumpulan Data 33
3.7 Teknik Analisis Data 34
3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 38
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 38
4.2 Hasil Penelitian 45
4.3 Temuan Penelitian 66
BAB V PENUTUP 74
B. Kesimpulan 74
C. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA 76
LAMPIRAN 80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 88

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Fokus Penelitian……... 31

Tabel 2 Informan Penelitian…….. 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Peta Wilayah Kerja BBPOM di Banda Aceh di Provinsi Aceh..... 39

Gambar 1 2 Sturktur Organisasi..... 44

Gambar 1 3 Visi dan Misi BBPOM 45

Gambar 1 4 Grafik Capaian Sampling Obat dan Makanan..... 46

Gambar 1 5 Profil Hasil Pengujian Produk Pangan dan Kemasan Pangan..... 61

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi 81
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....82
Lampiran 3 Surat Sesudah Penelitian.....83
Lampiran 4 Dokumentasi 85

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Perkembangan zaman yang kian pesat menjadikan teknologi sebagai elemen yang tidak terpisahkan serta memiliki peran yang semakin krusial dalam berbagai sektor kehidupan. Transformasi signifikan terjadi pada industri farmasi, produksi obat tradisional Indonesia, pangan, kosmetika, hingga alat kesehatan sebagai implikasi langsung dari kemajuan teknologi tersebut. Melalui pemanfaatan teknologi mutakhir, berbagai sektor industri kini memiliki kapasitas untuk menghasilkan produk dalam skala besar dengan tingkat keragaman yang semakin luas dan kompleks.[1]

Di Indonesia, salah satu institusi yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), termasuk unit pelaksana teknisnya yaitu Balai Besar POM (BBPOM). Secara fungsional, peran BPOM memiliki kesetaraan dengan *Food and Drug Administration* (FDA) di Amerika Serikat. BPOM merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam struktur pertanggungjawabannya, BPOM berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada menteri yang membidangi urusan kesehatan.[2]

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut didasarkan pada berbagai regulasi,

[1] "Teori Organisasi | PDF," accessed January 23, 2026, https://www.scribd.com/document/451628500/Teori-Organisasi.

[2] "Peran dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," HonestDocs, accessed January 29, 2026, https://www.honestdocs.id/peran-dan-fungsi-bpom.

antara lain Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 yang mengatur tentang pedoman penyelenggaraan uji mutu obat dan makanan. Selain itu, untuk memperkuat landasan hukum dalam perlindungan masyarakat, pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Regulasi-regulasi tersebut secara normatif menuntut BPOM sebagai lembaga pengawas untuk menjalankan fungsinya secara optimal, profesional, dan akuntabel dalam memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) merupakan perangkat teknis operasional yang berada di bawah naungan BPOM, yang memiliki mandat untuk mengimplementasikan kebijakan teknis di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku. Sementara itu, merujuk pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diklasifikasikan sebagai lembaga pemerintah nonkementerian di tingkat pusat yang mengemban fungsi strategis dalam melakukan pengendalian, pengawasan, serta pengaturan distribusi obat dan makanan secara nasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPOM bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor kesehatan, sekaligus memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan terkait sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Formalin merupakan senyawa kimia yang secara luas dimanfaatkan sebagai agen antimikroba atau pembasmi kuman, sebagaimana dinyatakan oleh BPOM. Zat ini diaplikasikan dalam berbagai sektor industri dan produk, di antaranya sebagai komponen dalam pembersih lantai, fasilitas transportasi laut, gudang penyimpanan, tekstil, bahan pewarna, produk berbasis kaca, bahan peledak, parfum, pengawet kosmetik, serta pengeras kuku. Selain itu, formalin juga berperan sebagai agen antikorosi pada sumur minyak, bahan baku isolasi busa, dan perekat dalam industri kayu lapis *(plywood)*. Dalam bidang fotografi, formalin dimanfaatkan untuk memperkuat lapisan gelatin dan kertas foto. Pada konsentrasi yang sangat rendah, yakni kurang dari 1%, formalin juga ditemukan dalam sejumlah produk konsumen, seperti deterjen pencuci piring, pembersih rumah tangga, pelembut kain, perawatan sepatu, sampo kendaraan, lilin, dan pembersih karpet. Di ranah farmasi, formalin digunakan sebagai agen inaktivasi toksin dalam pembuatan vaksin serta dalam formulasi obat untuk kutil, yang berkaitan dengan kemampuannya dalam mendenaturasi protein.[3]

Formalin merupakan salah satu jenis bahan tambahan pangan (BTP) yang dalam beberapa waktu terakhir kerap disalahgunakan dan berpotensi menimbulkan dampak serius bagi kesehatan manusia. Senyawa ini bersifat neurotoksik sehingga dapat merusak sistem saraf, serta memberikan efek negatif terhadap sistem reproduksi, termasuk gangguan pada testis dan ovarium, ketidakteraturan siklus menstruasi, hingga terjadinya infertilitas sekunder. Di kalangan masyarakat,

[3] Dr Ir Wisnu Cahyadi M.Si, *Analisis & Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan* (Bumi Aksara, 2023).

formalin juga sering dimanfaatkan sebagai agen antiparasit untuk mengeliminasi bakteri dan parasit pada ikan hias. Ironisnya, zat ini masih ditemukan dalam berbagai bahan pangan yang umum dikonsumsi sehari-hari, seperti mi basah, ikan asin, dan tahu.[4]

Setelah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap sejumlah jenis makanan yang beredar di masyarakat diumumkan, perhatian publik terhadap penggunaan formalin sebagai pengawet makanan meningkat. Baik sebagai bahan utama maupun bantu, formalin digunakan dalam berbagai proses produksi di berbagai industri. Namun, aturan yang berlaku melarang penggunaan formalin pada bahan makanan, tetapi penggunaan formalin secara tidak terkendali membuat masalah.[5]

Hasil Uji Formalin pada Mie Kuning dengan KIT Formalin LABTEST, Berdasarkan hasil pengujian terhadap 10 sampel mie yang diberi kode Mie A sampai Mie J, diperoleh bahwa sebanyak 9 sampel (Mie A, Mie B, Mie C, Mie D, Mie E, Mie F, Mie G, Mie H, dan Mie I) menunjukkan hasil negatif (–). Sementara itu, hanya satu sampel, yaitu Mie J, yang menunjukkan hasil positif (+). Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar sampel mie yang diuji tidak mengandung zat yang diperiksa, sedangkan satu sampel terdeteksi mengandung zat tersebut sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Berdasarkan pengamatan pada hasil uji, terdapat 10 sampel mie yang diuji

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[4] *Pengaruh Formula Gel Nanofitosom Fraksi Etil Asetat Jahe Merah (Zingiber officinale Linn. var. rubrum) Terhadap Aktivitas Antiinflamasi pada Mencit Putih Jantan*, with Putri, Intani Julien (2025), http://scholar.unand.ac.id/491481/1/Cover%20dan%20Abstrak.pdf.

[5] Agustina Arifah, *Analisis Kandungan Formalin Dalam Pangan Olahan Yang Beredar Di Pasar Seroja Kota Bekasi Secara Spektrofotometri UV-VIS*, 2021.

kandungan formalinnya. Sampel MieJ terdeteksi positif mengandung formalin karena menunjukkan perubahan warna menjadi ungu saat ditetesi reagen formalin merk LABTEST. Perubahan warna ini mengindikasikan adanya reaksi formalin membentuk senyawa kompleks yang menghasilkan warna merah keunguan, sesuai dengan penjelasan Male (2017). Sementara itu, sampel MieA hingga MieI tidak menunjukkan kandungan formalin karena tidak terjadi perubahan warna saat diuji dengan reagen tersebut. Dari 10 sampel mie kuning yang diteliti, sampel MieA sampai MieI mengalami perubahan tekstur seperti bau yang mulai tidak sedap, warna yang memudar, serta menjadi basah dan lengket saat disentuh. Namun, sampel MieJ yang mengandung formalin tidak mengalami perubahan tekstur sama sekali.[6]

Laporan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Banda Aceh pada tahun 2022 mengindikasikan adanya temuan penggunaan formalin pada tiga sampel ikan segar serta dua sampel mie basah yang beredar di wilayah Aceh. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi, pemanfaatan Bahan Tambahan Pangan (BTP) seperti pengawet, penyedap rasa, dan zat pewarna mengalami peningkatan signifikan. Hal ini dilakukan melalui berbagai pendekatan guna memenuhi tuntutan kebutuhan sekaligus preferensi konsumen yang semakin beragam. Dalam kerangka regulasi, penggunaan bahan berbahaya seperti formalin dalam pangan telah secara tegas dilarang melalui berbagai ketentuan perundang-undangan, antara lain Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang

[6] Sari, Ayu Nirmala, "Analisis Kandungan Formalin Dan Methanyl Yellow Pada Mie Kuning Di Kota Banda AceH," accessed January 29, 2026, https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5614061.

Bahan Tambahan Pangan yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2023 mengenai bahan yang dilarang sebagai bahan baku maupun BTP dalam produk pangan. Selain itu, larangan tersebut juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang secara eksplisit menegaskan ketidakbolehan penggunaan formalin dalam makanan.[7]

Secara toksikologis, keberadaan formalin dalam bahan pangan berpotensi menimbulkan dampak kesehatan yang serius, seperti gangguan sistem pernapasan, sensasi pusing, hingga peningkatan risiko kanker paru-paru. Senyawa ini diklasifikasikan sebagai zat berbahaya karena memiliki sifat toksik, karsinogenik, dan mutagenik, yang dapat memicu iritasi, kerusakan jaringan, serta perubahan patologis pada tubuh. Paparan melalui inhalasi uap formaldehida juga diketahui dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, sakit kepala, rinitis, hingga mual.

Pada produk tempe, penggunaan boraks biasanya dilakukan untuk memperpanjang masa simpan dan menjaga tekstur agar tidak cepat rusak atau berlendir. Kondisi ini menjadi masalah serius karena tempe merupakan bahan pangan yang dikonsumsi hampir setiap hari oleh masyarakat. Jika tempe yang mengandung boraks dikonsumsi secara terus-menerus, maka dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, seperti gangguan pencernaan, kerusakan hati, gangguan ginjal, gangguan saraf, bahkan dapat meningkatkan risiko kanker apabila terpapar dalam jangka panjang.[8]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[7] "Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2023," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed January 29, 2026, http://peraturan.bpk.go.id/Details/284990/peraturan-bpom-no-22-tahun-%202023.

[8] Cinto Bayani et al., "Kandungan Formalin Dan Boraks Pada Makanan Jajanan: Studi Literatur," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 14, no. 2 (2022): 82–90, https://doi.org/10.52022/jikm.v14i2.258.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), menemukan produk makanan berupa kerupuk tempe memakai campuran bahan pangan berbahaya jenis boraks di Banda Aceh.

Menurut laporan BBPOM tahun 2024 kepala BBPOM Banda Aceh, Yudi Noviandi mengatakan kerupuk tempe yang menggunakan campuran bubuk kristal mengandung boron itu diproduksi di Gampong Doi, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh. Di Gampong Doy, itu salah satu pembuat kerupuk tempe yang selalu kalau diuji positif. Yudi menyampaikan, BBPOM telah beberapa kali mengedukasi agar tidak menggunakan boraks dalam memproduksi kerupuk tempe.

Berdasarkan keterangan pemilik usaha, boraks yang digunakan untuk mempercantik dan membuat kerupuk tempe menjadi renyah tersebut didapatkan di kawasan Pasar Lambaro, Aceh Besar. Sementara itu, kata Yudi, Nomor Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang terdapat pada garam pengembang merek Serumpun Ayam juga palsu. Sebab BBPOM tidak pernah melegalkan penggunaan boraks untuk makanan.[9]

Permasalahan boraks pada tempe menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan keamanan pangan. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan yang ketat dari pemerintah, peningkatan edukasi kepada produsen dan konsumen, serta pemeriksaan rutin terhadap produk pangan yang beredar di masyarakat agar penggunaan boraks pada tempe maupun makanan lainnya dapat dicegah.

Mengingat urgensi aspek keamanan pangan, diperlukan upaya pengujian

[9]. AJNN.net https://share.google/0LyCfgy76Y50pkJBN

yang komprehensif guna mengidentifikasi keberadaan zat berbahaya dalam produk makanan. Oleh karena itu, dilakukan analisis terhadap kandungan formalin pada mie yang beredar di Kota Banda Aceh sebagai langkah verifikasi kelayakan konsumsi bagi masyarakat.[10]

Dengan demikian, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Banda Aceh terhadap peredaran bahan makanan yang mengandung formalin dan boraks di masyarakat. Penelitian ini penting dilakukan mengingat formalin dan boraks masih sering ditemukan pada sejumlah produk pangan yang beredar, padahal kedua zat tersebut berbahaya bagi kesehatan apabila dikonsumsi dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengawasan yang dilakukan mampu menekan peredaran pangan berbahaya serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan..

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam mencapai target yang dihadapi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh, diperlukan kerja sama yang erat masyarakat dan komitmen yang kuat antara BBPOM, pemerintah daerah, serta dalam menjaga keamanan obat dan makanan di Provinsi Aceh. Berdasarkan latar permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Efektivitas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh Terhadap Pengawasan Bahan Makan yang Mengandung Formalin di Kota Banda Aceh".**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[10] "Identifikasi Kandungan Formalin Pada Tahu Putih Di Pasar Tradisional Airmadidi | Biofarmasetikal Tropis (The Tropical Journal of Biopharmaceutical)," accessed January 29, 2026, https://journal.fmipaukit.ac.id/index.php/jbt/article/view/251.

1.2 Identifikasi Masalah

1) Masih ditemukannya bahan makanan yang mengandung formalin di Kota Banda Aceh, meskipun telah ada pengawasan dari BBPOM Aceh.
2) Tingginya potensi penyalahgunaan formalin sebagai bahan pengawet makanan oleh oknum pedagang karena alasan ekonomis dan kurangnya kesadaran akan bahaya formalin bagi kesehatan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pengawasan BBPOM terhadap peredaran Bahan Makan yang Mengandung Formalin di Kota Banda Aceh?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana efektivitas pengawasan BBPOM terhadap peredaran Bahan Makan yang Mengandung Formalin di Kota Banda Aceh

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi signifikan serta memberikan nilai guna, baik dalam ranah akademik maupun profesional. Adapun manfaat yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

1).Secara akademik

Dari perspektif akademik, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan elaborasi konseptual yang komprehensif terkait tingkat efektivitas mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh BBPOM terhadap distribusi bahan pangan yang terindikasi mengandung formalin di wilayah Kota Banda Aceh.

2).Secara Profesional (Praktis)

Dari sisi profesional atau praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen evaluatif sekaligus parameter rujukan dalam proses perumusan kebijakan, khususnya dalam upaya optimalisasi dan perbaikan sistem pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM terhadap peredaran bahan pangan yang mengandung formalin di Kota Banda Aceh.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan pangan dan obat di Indonesia. Penelitian oleh Launde, Pioh, dan Waworundeng[11] menunjukkan bahwa pengawasan BPOM di Kota Manado belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pangan.

Putri, Muna, dan Rahmayanti mengkaji keberadaan formalin pada baby cumi kering yang diperdagangkan di pasar tradisional Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan seluruh sampel yang diuji positif mengandung formalin, yang mengindikasikan masih maraknya penggunaan bahan pengawet ilegal pada produk pangan. Temuan ini memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap bahan pangan tertentu yang berisiko bagi kesehatan masyarakat.[12]

Penelitian Yuhermansyah, Akbar, dan Nabilla menelaah penegakan hukum BPOM Banda Aceh terhadap tindak pidana penggunaan boraks dan formalin dalam produksi pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum

[11] Agata Pransiska Launde et al., "Tugas Dan Fungsi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Melindungi Kesehatan Masyarakat Di Kota Manado (Studi Kasus Tentang Penggunaan Bahan Makanan Berbahaya Di Kota Manado)," *Jurnal Eksekutif* 2, no. 5 (2020), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/29457.

[12] "IDENTIFIKASI FORMALIN PADA BABY CUMI (Loligo Sp) KERING | JoMLaT (Journal of Medical Laboratory Technology)," accessed May 12, 2026, https://journal.poltekkesaceh.ac.id/index.php/jomlat/article/view/592.

optimal karena keterbatasan jumlah penyidik dan kewenangan dalam menindak pelanggaran berulang, meskipun didukung oleh fasilitas laboratorium dan kerja sama sebagian pelaku usaha.

Selanjutnya, Wahongan, Simbala, dan Gosal menemukan bahwa meskipun telah terdapat regulasi nasional mengenai keamanan pangan dan perlindungan konsumen, implementasinya belum berjalan maksimal akibat rendahnya kesadaran produsen serta lemahnya sistem pengawasan. Sementara itu, penelitian Khalid, Sastro, dan Yusrizal menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan BBPOM Banda Aceh terhadap peredaran obat keras di Aceh Utara masih terkendala oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko penggunaan obat keras tanpa resep.[13]

Berdasarkan hasil kajian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam pengawasan pangan dan obat terletak pada aspek efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Namun demikian, belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji efektivitas BPOM Aceh dalam pengawasan bahan makanan yang mengandung formalin di Kota Banda Aceh, sehingga penelitian ini memiliki relevansi dan kebaruan (*research gap*) untuk dilakukan.

[13] Simbala Wahongan, "Strategi Mewujudkan Keamanan Pangan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen," *LEX ET SOCIETATIS* 9, no. 3 (2021), https://doi.org/10.35796/les.v9i3.36435.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Efektifitas

Istilah *efektif* berakar dari bahasa Inggris *effective* yang mengandung makna keberhasilan atau kemampuan suatu aktivitas dalam merealisasikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dari istilah tersebut kemudian diturunkan konsep *efektivitas*, yang mengacu pada derajat pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam konteks konseptual, efektivitas kerap dikaitkan dengan tingkat keselarasan antara sasaran yang direncanakan dengan luaran yang dihasilkan. Effendy mengemukakan bahwa efektivitas dapat dimaknai sebagai suatu proses komunikasi yang berlangsung secara terstruktur dan sistematis guna merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan, dengan tetap mempertimbangkan aspek kuantitas sumber daya manusia yang terlibat besaran biaya yang dialokasikan, serta waktu pelaksanaan yang telah ditentukan.

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli mengenai efektivitas sebagaimana telah diuraikan, dapat dipahami bahwa konsep efektivitas memiliki beragam pengertian yang disesuaikan dengan sudut pandang dan disiplin ilmu masing-masing. Meskipun demikian, seluruh pandangan tersebut memiliki kesamaan tujuan, yakni memastikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.[14]

[14] SAVIRA, Balqis Ayu ,*Efektivitas Sistem Zonasi Dalam Penyetaraan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Banyumas*, with SAVIRA, Balqis Ayu (2020), http://repository.unsoed.ac.id/6186/1/COVER-Balqis%20Ayu%20Savira-F1B016108-Skripsi-2020.pdf.

Efektivitas merepresentasikan kapasitas suatu entitas, baik organisasi maupun institusi sejenis, dalam mengoperasionalkan tugas dan fungsi yang mencakup pelaksanaan program, aktivitas, atau misi secara optimal tanpa memunculkan tekanan maupun konflik di antara para pelaksana. Menurut Effendy, efektivitas dimaknai sebagai suatu proses komunikasi yang mampu merealisasikan tujuan yang telah direncanakan dengan tetap selaras terhadap alokasi biaya, batasan waktu yang ditetapkan, serta jumlah sumber daya manusia yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas memiliki keterkaitan erat dengan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas utama, pencapaian sasaran yang telah dirumuskan, ketepatan dalam pemanfaatan waktu, serta adanya keterlibatan aktif dari seluruh anggota organisasi.

Pengukuran efektivitas organisasi bukanlah hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dianalisis dari berbagai perspektif dan sangat bergantung pada pihak yang melakukan penafsiran serta penilaian. Oleh karena itu, para ahli mengemukakan sejumlah pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas suatu organisasi. Pendekatan-pendekatan tersebut penting untuk dijadikan sebagai landasan dalam proses pengukuran efektivitas organisasi.[15]

[15] *efektivitas Pelaksanaan Unit Kerja Layanan (Ukl) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan*, with Evandes, Travolta (2023), http://scholar.unand.ac.id/124722/1/Cover%20dan%20Abstrak.pdf.

2.2.2 Indikator Efektifitas

Teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Robert B. Duncan memandang efektivitas sebagai konsep multidimensional yang tidak dapat diukur hanya dari satu indikator tunggal.[16] Duncan menegaskan bahwa efektivitas organisasi harus dilihat sebagai kemampuan organisasi mencapai tujuan melalui proses yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan hubungan internal dan eksternal organisasi. Duncan mengklasifikasikan efektivitas organisasi ke dalam tiga dimensi utama, yaitu pencapaian tujuan (goal attainment), integrasi (integration), dan adaptasi (adaptation).[17]

2.2.2.1 Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

Pencapaian tujuan mencerminkan seluruh upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan dan harus dipahami sebagai suatu proses yang berkelanjutan. Untuk memastikan tercapainya tujuan akhir, diperlukan adanya tahapan-tahapan yang terstruktur, baik dalam pembagian capaian pada setiap bagian maupun dalam konteks periodisasi waktu pelaksanaannya.[18]

---

[16] Robert B. Duncan, *Multiple Decision Making Structures in Adapting to Environmental Uncertainty: The Impact on Organizational Effectiveness* (Northwestern Univ., Graduate School of Management, 1972).

[17] Robert B. Duncan, "Mltiple Decision-Making Structures in Adapting to Environmental Uncertainty: The Impact on Organizational Effectiveness," *Human Relations* 26, no. 3 (1973): 3, https://doi.org/10.1177/001872677302600301.

[18] Gamal Ferdhi, "Efektivitas Program Ppm Di Kabupaten Halmahera Utara Oleh Pt Nusa Halmahera Minerals Masa Pandemi Covid-19 TAHUN 2020-2021," *Jurnal Sosial dan Humaniora* 9, no. 2 (2024): 145–59, https://doi.org/10.47313/pjsh.v9i2.3524.

Dimensi pencapaian tujuan berkaitan dengan sejauh mana organisasi mampu merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Fokus utama dimensi ini adalah hasil akhir (output) organisasi.

Indikator pencapaian tujuan meliputi:

- Tingkat keberhasilan program kerja
- Kesesuaian hasil dengan target yang direncanakan
- Efisiensi penggunaan sumber daya
- Produktivitas organisasi

2.2.2.2 Integrasi (*Integration*)

Integrasi mengacu pada kemampuan organisasi dalam menjaga keharmonisan hubungan internal antarindividu dan kelompok kerja. Duncan menekankan bahwa organisasi yang efektif harus mampu membangun koordinasi, komunikasi, dan kerja sama yang baik di antara anggotanya.[19]

Indikator integrasi meliputi:

- Tingkat kerja sama antarunit
- Kejelasan peran dan tugas
- Rendahnya konflik organisasi

[19] Rizki Revashandi Ihsan Laduni and Sri Wibawani, "Efektivitas Pelayanan Program Kartu Identitas Anak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Di Kelurahan Wonokromo," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 13, no. 2 (2023): 149–57, https://doi.org/10.33592/jiia.v13i2.4305.

2.2.2.3 Adaptasi (*Adaptation*)

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Menurut Duncan, organisasi yang efektif tidak bersifat statis, melainkan mampu merespons tantangan, peluang, dan perubahan secara dinamis.[20]

Indikator adaptasi meliputi:

- Fleksibilitas kebijakan dan struktur
- Kemampuan inovasi
- Respons terhadap perubahan lingkungan[21]

2.2.3 Pengawasan

Pengawasan adalah keseluruhan upaya untuk mengetahui dan mengungkapkan apakah tugas atau kegiatan telah dilakukan dengan benar atau tidak. Pengawasan juga merupakan tindakan yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa semua aktivitas operasional organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.[20] Pengawasan adalah proses menilai hasil dan melakukan koreksi jika diperlukan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai rencana.[22]

---

[20] Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen publik* (Grasindo, 2005).
[21] Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen publik* (Grasindo, 2005).
[22] Abdul Khalid, "Efektifitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banda Aceh Terhadap Peredaran Obat Keras Di Kabupaten Aceh Utara," *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10 (November 2022): 413, https://doi.org/10.29103/sjp.v10i2.9136.

2.2.3.1 Indikator Pengawasan

Pengendalian dalam organisasi perlu diimplementasikan secara optimal agar sasaran yang telah dirumuskan dapat terealisasi secara efektif. Proses pengendalian akan berfungsi secara maksimal apabila setiap bentuk deviasi yang muncul selama pelaksanaannya segera diidentifikasi dan dilaporkan, sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan korektif secara cepat dan tepat guna, serta memastikan pencapaian tujuan sesuai dengan ekspektasi yang telah ditetapkan. Dalam konteks kajian ini, merujuk pada pemikiran Robert J. Mockler sebagaimana dikutip oleh Yohannes Yahya, terdapat sejumlah indikator yang mencirikan sistem pengawasan yang efektif, yaitu sebagai berikut:

a. Presisi (akurasi), data dan informasi yang berkaitan dengan aktivitas operasional harus memiliki tingkat ketepatan yang tinggi. Ketidakakuratan informasi dari sistem pengendalian berpotensi menimbulkan persepsi masalah yang semu serta mendorong pengambilan keputusan yang keliru.
b. Ketepatan waktu, apabila diperlukan tindakan perbaikan, maka proses pengumpulan, penyampaian, dan analisis data harus dilakukan secara segera agar respons yang diberikan tidak terlambat.
c. Objektivitas dan komprehensivitas, informasi yang disajikan

harus bersifat menyeluruh, bebas dari bias, serta disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami.

d. Fokus pada titik-titik kritis pengendalian, sistem pengawasan hendaknya diarahkan pada area-area yang memiliki potensi penyimpangan paling tinggi atau yang dapat menimbulkan dampak kerugian paling signifikan.
e. Kelayakan ekonomis, penerapan sistem pengawasan harus mempertimbangkan efisiensi biaya, di mana pengeluaran yang dikeluarkan tidak melebihi manfaat yang diperoleh.
f. Kesesuaian dengan kondisi organisasi, sistem pengawasan perlu diselaraskan dengan karakteristik, struktur, dan realitas yang ada dalam organisasi agar dapat berjalan secara harmonis.
g. Integrasi dengan alur kerja organisasi, setiap tahapan dalam proses kerja saling berkaitan dan berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan keseluruhan, sehingga hasil pengawasan harus diketahui oleh seluruh elemen organisasi.
h. Fleksibilitas, sistem pengawasan harus adaptif terhadap dinamika lingkungan, baik dalam menghadapi potensi ancaman maupun dalam memanfaatkan peluang yang ada.
i. Bersifat direktif dan operasional, pengawasan yang efektif harus mampu memberikan arahan yang jelas terkait standar yang digunakan serta tindakan korektif yang perlu dilakukan.
j. Diterima oleh anggota organisasi, sistem pengawasan hendaknya

dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mendukung kinerja individu, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta memberikan ruang kebebasan yang proporsional dalam bekerja..[23]

2.2.4 Efektivitas Pengawasan

Efektivitas pengawasan dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan proses pengawasan dalam mencegah dan memperbaiki penyimpangan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Menurut Duncan dalam Steers, efektivitas organisasi dapat diukur melalui tiga indikator utama, yaitu: (1) pencapaian tujuan *(goal attainment*), (2) integrasi (*integration)*, dan (3) adaptasi (*adaptation*).[24] Dalam konteks pengawasan, pencapaian tujuan berkaitan dengan kemampuan pengawasan dalam menekan pelanggaran dan memastikan kepatuhan, integrasi berkaitan dengan koordinasi antar lembaga atau unit terkait, sedangkan adaptasi menunjukkan kemampuan sistem pengawasan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan tantangan baru.

Selanjutnya, Robbins dan Coulter menjelaskan bahwa efektivitas pengawasan dipengaruhi oleh kejelasan standar pengawasan, ketersediaan sumber daya manusia, sistem informasi yang memadai, serta konsistensi dalam penerapan sanksi.[25] Pengawasan yang efektif harus didukung oleh prosedur yang jelas, aparat pengawas yang kompeten, serta mekanisme pelaporan dan

---

[23] Dhiana Ekowati et al., *Pengantar Manajemen* (2022). Hlm 373-374

[24] Richard M. Steers, *Efektivitas organisasi (Kaidah peri laku)* (Penerbit Erlangga, 1980).

[25] "Robbins, S.P. and Coulter, M. (2016) Management. 13th Edition, Pearson Education Limited, Harlow. - References - Scientific Research Publishing," accessed February 4, 2026, https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2647309.

tindak lanjut yang terstruktur. Tanpa adanya tindak lanjut terhadap temuan pengawasan, maka proses pengawasan tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kinerja organisasi.

Dalam perspektif administrasi publik, Ndraha menyatakan bahwa efektivitas pengawasan juga ditentukan oleh tingkat kepatuhan objek yang diawasi serta partisipasi masyarakat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan masyarakat sebagai pengawas sosial (*social control*).[26] Dengan demikian, efektivitas pengawasan tidak semata-mata bergantung pada institusi pengawas, tetapi juga pada kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran.

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengawasan merupakan kemampuan suatu sistem pengawasan dalam menjamin tercapainya tujuan organisasi melalui penetapan standar, pemantauan pelaksanaan, pendeteksian penyimpangan, serta penerapan tindakan korektif secara konsisten. Efektivitas pengawasan ditentukan oleh kejelasan regulasi, kompetensi aparat pengawas, koordinasi antar lembaga, ketersediaan sarana prasarana, serta peran serta masyarakat.

2.3 Peredaran

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.11.10052 Tahun 2011, khususnya Pasal 1 ayat (5), istilah peredaran dimaknai secara komprehensif sebagai keseluruhan

[26] "Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) (Jilid 1-2) /Taliziduhu Ndraha | Perpustakaan Universitas Terbuka," accessed February 4, 2026, https://opac.ut.ac.id/detail-opac?id=17145.

aktivitas yang berkaitan dengan distribusi, baik yang berorientasi komersial maupun nonkomersial. Aktivitas tersebut meliputi serangkaian tindakan seperti pengadaan, transportasi, penyerahan, distribusi, transaksi penjualan, penyediaan di lokasi tertentu, hingga penyimpanan. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep peredaran diartikan sebagai suatu proses dinamis yang berlangsung secara kontinu, di mana sesuatu mengalami perpindahan atau perubahan kondisi secara berulang hingga menyerupai suatu siklus yang berkesinambungan.[27]

2.4 Makanan

Pangan merupakan elemen fundamental yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup. Namun demikian, keberadaannya tidak terlepas dari potensi risiko kontaminasi oleh mikroorganisme patogen, seperti bakteri dan kuman, yang dapat memicu gangguan kesehatan, termasuk penyakit infeksi seperti diare maupun kejadian keracunan makanan. Tingkat risiko tersebut cenderung meningkat pada makanan yang dipasarkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), mengingat praktik penyimpanan yang kerap tidak memenuhi standar, teknik pengolahan yang kurang tepat, serta penyajian yang belum sepenuhnya mengacu pada prinsip higiene dan sanitasi yang optimal.[28]

Keamanan pangan merupakan aspek esensial yang harus dijaga secara ketat pada setiap tahapan, mulai dari proses produksi hingga penyajian akhir. Secara

[27] "Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed January 29, 2026, https://kbbi.web.id/.

[28] "Sosialisasi Jenis-Jenis Makanan Yang Tidak Baik Untuk Diperjualbelikan Di Pasar Perumnas Kota Mataram | Eastasouth Journal of Effective Community Services," accessed January 29, 2026, https://ejcs.eastasouth-institute.com/index.php/ejecs/article/view/389.

umum, pangan berpotensi mengandung tiga kategori bahaya utama, yakni bahaya biologis, kimiawi, dan fisik. Bahaya biologis mencakup kontaminasi oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan parasit; bahaya kimiawi berkaitan dengan paparan zat berbahaya seperti residu pestisida, logam berat, maupun bahan tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan; sedangkan bahaya fisik merujuk pada keberadaan benda asing, seperti fragmen plastik, serpihan logam, atau kontaminan lainnya yang masuk secara tidak disengaja ke dalam makanan. Penting untuk dipahami bahwa tampilan makanan yang menarik serta kandungan gizi yang memadai tidak serta-merta menjamin keamanannya apabila terjadi kontaminasi, baik oleh salah satu maupun kombinasi dari ketiga jenis bahaya tersebut. Dalam kondisi demikian, makanan yang semestinya berfungsi sebagai sumber nutrisi justru berpotensi menjadi agen penyebab penyakit sehingga tidak layak untuk dikonsumsi.[29]

2.4.1 Keamanan Makanan

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 mengenai Keamanan Pangan, konsep keamanan pangan dimaknai sebagai suatu keadaan sekaligus serangkaian tindakan preventif yang dirancang untuk menghindari terjadinya kontaminasi pada pangan, baik yang berasal dari agen biologis, zat kimia, maupun benda asing lainnya, yang berpotensi menimbulkan gangguan,

[29] "Intervensi Higiene Sanitasi Pada Pedagang Kaki Lima Untuk Mewujudkan Keamanan Pangan Di Kebayoran Baru, Jakarta | Wulandari | Jurnal Pengabdian Kesehatan Beguai Jejama," accessed January 29, 2026, https://jpt.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/beguaijejama/article/view/9001/69.

kerugian, ataupun ancaman terhadap kesehatan manusia. Selain itu, pangan yang dikonsumsi juga dituntut untuk selaras dengan nilai-nilai agama, kepercayaan, serta budaya yang dianut oleh masyarakat, sehingga layak dan aman untuk dikonsumsi.[30]

Ketika makanan masih aman untuk dikonsumsi, itu disebut keamanan pangan. Keamanan makanan memiliki dua definisi utama: aman secara rohani dan aman secara fisik. Aman secara rohani berarti makanan itu halal atau sesuai dengan agama. Aman secara fisik berarti makanan tidak terkontaminasi oleh zat kimia atau bahan kimia fisik. Produk makanan di Indonesia masih tidak memenuhi standar keamanan pangan. Berikut adalah beberapa alasan makanan tidak memenuhi standar mutu dan keamanan berikut:[31]

a. Penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang atau melebihi batas penggunaan
b. Pestisida, logam berat, dan obat pertanian menyebabkan pencemaran kimia berbahaya pada produk makanan
c. Cemaran mikroba patogen dan mikroba penghasil toksin yang tinggi
d. Pelabelan dan periklanan produk pangan yang tidak memenuhi syarat
e. Beredarnya produk dengan kedaluwarsa, termasuk produk impor
f. Pemalsuan produksi pangan
g. Mutu dan keamanan produk pangan belum dapat bersaing di Pasar Internasional.

[30] "PP No. 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan," Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID], accessed January 29, 2026, https://peraturan.go.id/id/pp-no-86-tahun-2019.

[31] Sri Anggrahini, *Keamanan Pangan* (PT Kanisius, n.d.).

2.4.2 Formalin

Formalin adalah bahan pengawet nonpangan yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Formalin merupakan larutan formaldehid dalam udara dengan konsentrasi 30-40%, termasuk senyawa aldehid yang paling sederhana dengan rumus kimia H2CO. Formalin lebih reaktif dibandingkan aldehid lainnya. Bentuknya bisa berupa gas, cair, atau padatan yang dikenal sebagai paraformaldehid atau trioxan. Meskipun udara bebas formalin hadir dalam bentuk gas, senyawa ini tidak dapat larut dalam udara. Dalam bahan pangan mentah, formaldehida biasanya ditemukan dalam jumlah yang sangat kecil, berkisar antara 1 mg/kg hingga 90 mg/kg berat bahan. Di dalam udara, formaldehida cenderung mengalami polimerisasi dan hanya sebagian kecil, sekitar 10%, terdapat dalam bentuk monomer H2CO.[32]

Formalin adalah larutan tak berwarna yang memiliki bau sangat tajam dan biasanya mengandung sekitar 15 persen metanol sebagai pengawet untuk mencegah polimerisasi. Sebagai antiseptik dengan konsentrasi rendah antara 2% sampai 8%, formalin sering digunakan untuk membunuh bakteri dan jamur, serta untuk membersihkan alat medis dan mengawetkan mayat atau spesimen biologis lainnya. Namun, paparan formalin dalam jangka panjang dapat memicu kanker. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melarang penggunaan formalin sebagai bahan pengawet makanan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun

[32] Anggrahini, *Keamanan Pangan*.

2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.[33]

a. Manfaat Formalin

Berdasarkan keterangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), formalin pada hakikatnya merupakan senyawa kimia yang berfungsi sebagai agen antimikroba, yang lazim diaplikasikan dalam berbagai produk pembersih, termasuk untuk lantai, kapal, gudang, hingga tekstil. Di samping itu, zat ini juga memiliki peran sebagai insektisida yang efektif dalam mengendalikan lalat dan berbagai jenis serangga lainnya. Lebih lanjut, formalin dimanfaatkan dalam beragam proses industri, seperti dalam produksi serat sintetis (sutera buatan), bahan pewarna, pembuatan kaca cermin, serta sebagai komponen dalam bahan peledak. Tidak hanya itu, senyawa ini juga digunakan dalam formulasi parfum, sebagai bahan pengawet pada produk kosmetik sekaligus pengeras kuku, agen pencegah korosi pada instalasi sumur minyak, bahan dasar pembuatan isolasi busa, serta sebagai perekat dalam industri kayu lapis (plywood).

b. Penggunaan Formalin Dalam Makanan

Penggunaan formalin sebagai bahan pengawet makanan sering dilakukan oleh pedagang karena dapat mengurangi biaya produksi. Hal

[33] Setditjen Farmalkes, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan | Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan*, n.d., accessed January 29, 2026, https://farmalkes.kemkes.go.id/unduh/permenkes-033-2012/.

ini disebabkan formalin mudah didapat secara bebas dengan harga murah serta memiliki efektivitas dan efisiensi tinggi saat digunakan.[34]

Formalin tidak termasuk dalam daftar bahan tambahan pangan yang diperbolehkan. Menurut IARC (Badan Internasional untuk Penelitian Kanker), formalin dapat memicu kanker pada hewan melalui konsumsinya, meskipun kasus pada manusia jarang terjadi. Formalin sangat berbahaya jika terhirup, terkena kulit, atau tertelan karena mudah diserap melalui saluran pernapasan dan pencernaan. Di dalam tubuh, formalin bereaksi secara kimia dengan hampir semua senyawa sel, sehingga mengganggu fungsi sel, menyebabkan kematian sel, dan mengakibatkan keracunan.

2.4.3 Ciri-Ciri Makanan yang Mengandung Formalin

Makanan yang mengandung formalin biasanya tahan lama saat disimpan. Formalin dapat dikenali melalui bau yang agak menyengat dan terkadang menyebabkan iritasi pada mata. Ketika bahan makanan tersebut dimasak, bau khas formalin sering kali masih tercium. Berikut adalah beberapa ciri makanan olahan yang menggunakan formalin sebagai pengawet.[35]

a. Ikan asin

Ciri-ciri ikan asin yang mengandung formalin meliputi warna yang lebih putih dan tampak bersih, daya tahan yang lebih lama, tekstur

[34] "Analisis Kadar Formalin Dan Uji Organoleptik Ikan Asin Dibeberapa Pasar Tradisional Di Kabupaten Tuban - Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University," accessed January 29, 2026, http://etheses.uin-malang.ac.id/8252/.

[35] Anggrahini, *Keamanan Pangan*.

yang keras, tidak mempunyai bau khas ikan asin, serta tidak mudah dihampiri lalat.

b. Tahu

Ciri-ciri tahu yang mengandung formalin adalah teksturnya lebih kenyal karena protein dalam tahu terikat oleh formalin, tidak padat, sulit hancur, mengeluarkan bau khas formalin, dapat bertahan sampai 3 hari jika disimpan pada suhu kamar, dan dapat tahan hingga 15 hari jika disimpan di dalam lemari es.

c. Ayam potong

Ciri-ciri ayam potong yang mengandung formalin lebih putih dagingnya, tidak dihinggapi lalat pada saat dijual, awet dan tidak mudah busuk.

d. Bakso

Ciri-ciri bakso yang mengandung formalin teksturnya sangat kenyal, dan awet sampai 5 hari apabila disimpan pada suhu kamar.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2.5 Kerangka Berpikir

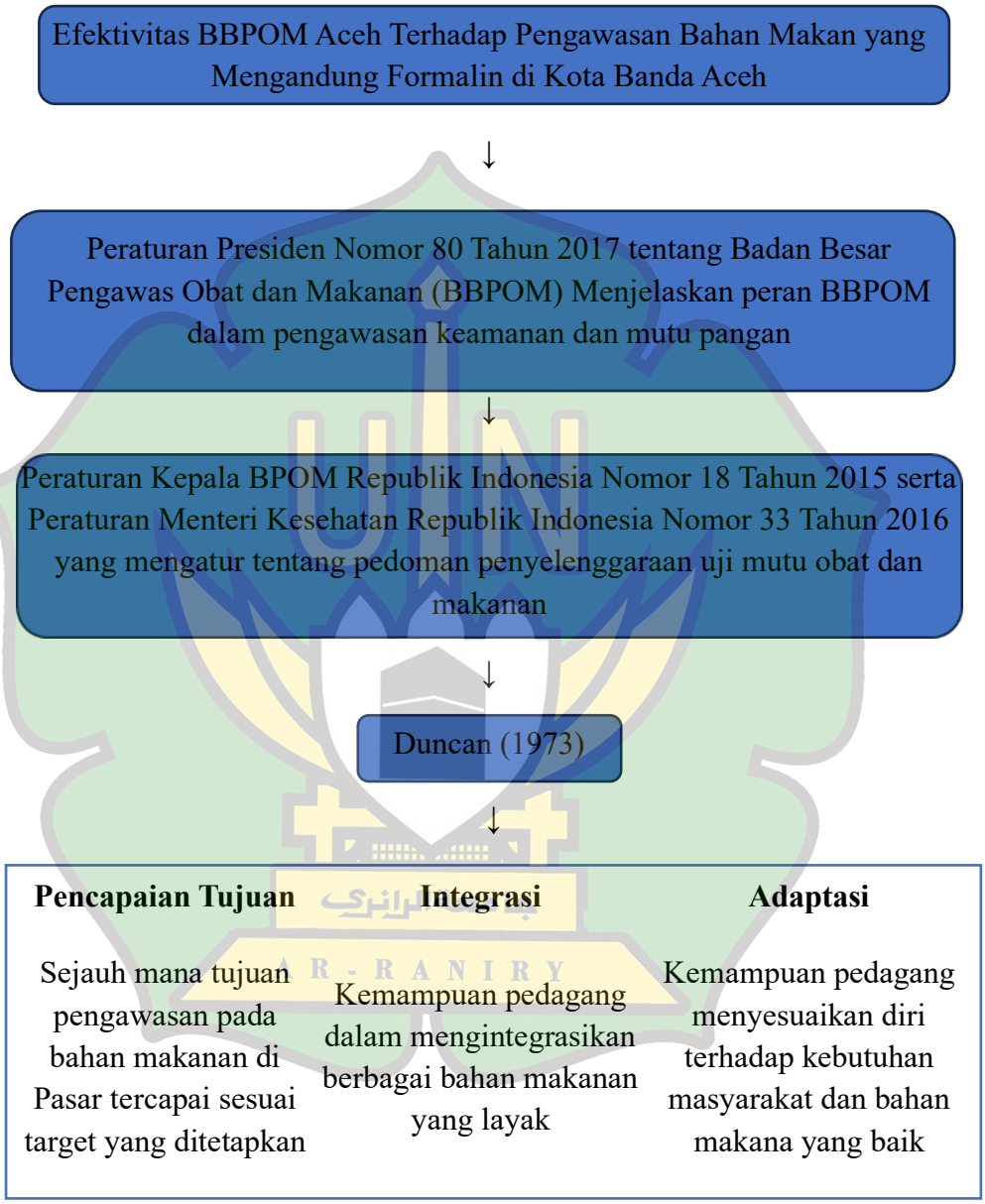

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk studi kualitatif yang menggunakan pendekatan naratif. Studi kualitatif dengan pendekatan naratif ini merupakan penelitian yang mendasari pada fenomena yang sifatnya alami dengan mendeskripsikan fenomena yang diambil oleh peneliti dengan disertai bukti konkret dengan mengandalkan ketajaman peneliti dalam menganalisis fenomena tersebut.[36] Melalui metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan naratif yang digunakan oleh peneliti bertujuan memperoleh gambaran, pemahaman dan penjelasan secara mendalam terutama dalam memperoleh data yang faktual terkait Efektivitas BBPOM Aceh Dalam Pengawasan Bahan Makan Tidak Layak Konsumsi Mengandung Formalin Yang Beredar Di Kota Banda Aceh. Penelitian ini melakukan wawancara sebagai teknik pengumpulan data dengan mengamati realita sosial melalui pengamatan peneliti yang disajikan dalam bentuk naratif.

3.2 Fokus Penelitian

Menjadi fokus penelitian ini adalah analisis Efektivitas BBPOM Aceh Terhadap Pengawasan Bahan Makan yang Mengandung Formalin di Kota Banda Aceh**.**

[36] Dr H. Zuchri Abdussamad M.Si S. I. K., *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021).

Tabel 1. Fokus Penelitian

Dimensi	Indikator	Sumber
Indikator Pengawasan	a. Pencapaian tujuan (goal attainment), b. Integrasi (integration), c. Adaptasi (adaptation)	Duncan (1973)[37]

3.3 Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat kegiatan yang dilakukan. Adapun tempat penelitian yang digunakan sebagai objek penelitian ini adalah kantor BBPOM Aceh dan pasar Al-mahira Lamdigin.

3.4 Informan Penelitian

Informan yang dipilih pada penelitian ini merupakan informan yang terlibat dalam Pengawasan bahan makan di Kota Banda Aceh, dan informan langsung yang merupakan BPOM Aceh.

[37] "Duncan (1973) | PDF," Scribd, accessed April 28, 2026, https://www.scribd.com/document/357129888/Duncan-1973.

Tabel 2 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala BPOM Aceh	1 orang
2.	Kepalan Bidang Pengawasan Pangan	1 orang
3.	Petugas Pemeriksa Lapangan	1 orang
4.	Pedagang	4 orang
Jumlah		7 orang

Sumber : Oleh Peneliti

Peneliti memilih informan tersebut pada penelitian ini dengan alasan sebagai berikut.

1. Kepala BBPOM Aceh merupakan informan yang mampu menjelaskan secara teknis sekaligus memberikan informasi, keterangan, dan data terkait Efektivitas BBPOM Aceh Dalam Pengawasan Bahan Makan Mengandung Formalin Yang Beredar Di Kota Banda Aceh.
2. Kepalan Bidang Pengawasan Pangan merupakan informan yang dapat memberikan informasi dan keterangan secara jelas dan akurat terhadap keterlibatan mereka dalam Pengawasan Bahan Makan Formalin Yang Beredar Di Kota Banda Aceh. Dimana informal juga di bantu oleh bidang infokom.

3. Petugas Pemeriksa Lapangan merupakan informan yang dapat memberikan informasi dan keterangan terkait Pengawasan Bahan Makan Mengandung Formalin Yang Beredar Di Kota Banda Aceh

3.5 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diterima langsung dari sumber utama peneliti disebut data primer.[38] Adapun data primer dalam penelitian ini yang didapatkan dari hasil pengamatan langsung (observasi), hasil dari wawancara peneliti dengan informan antara lain BBPOM Aceh, Produsen dan Konsumen.

2. Data Sekunder

Data yang telah dipublikasikan dan data yang tersedia atau dikumpulkan oleh orang lain disebut data sekunder. Data sekunder untuk penelitian ini berasal dari BBPOM Aceh, serta dari sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan subjek penelitian atau dari dokumen yang mendukung dan relevan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu proses di mana dua orang atau lebih berinteraksi untuk mendapatkan atau berbagi informasi, dan berbagi gagasan berdasarkan pertanyaan dan jawaban yang membentuk artinya tentang topik tertentu.[39] Pada

[38] Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian* (2016).
[39] Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Rajawali Press, 2020), https://digilib.uinsgd.ac.id/31676/.

penelitian ini, wawancara terstruktur, di mana peneliti berfokus pada masalah umum yang akan ditanyakan daripada menggunakan protokol wawancara yang disusun secara sistematis. Peneliti akan lebih banyak mendengarkan apa yang diperoleh dari informan dan menganalisis setiap informasi yang diterima dari informan sehingga peneliti dapat memberikan berbagai pertanyaan lanjutan yang lebih tepat berdasarkan tujuan.[40]

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman dari kejadian yang telah terjadi. Teknik dokumen ini dapat mengumpulkan data dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya besar dari individu atau lembaga tertentu, jadi penting untuk memilih dokumen yang dapat diandalkan.[41] Dokumentasi dalam penelitian ini berupa gambar, regulasi, dan berita yang disampaikan dari media berkala atau media internet.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini mengadopsi teknik analisis data berdasarkan model Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang prosesnya berlangsung secara simultan sejak tahap awal pengumpulan data hingga berakhirnya keseluruhan rangkaian penelitian dalam kurun waktu tertentu. Adapun tahapan analisis data yang diterapkan dapat diuraikan sebagai berikut:[42]

1. Reduksi Data *(Data Reduction)*

Proses reduksi data merupakan upaya sistematis dalam

[40] Arif Rachman Et Al., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (2024).
[41] Syahza, *Metodologi Penelitian*. Hlm 84
[42] Rachman et al., *Metode Penelitian Kuantitatif, KualitatiF DAN R&D*.hlm 246

menyederhanakan, memfokuskan, serta mengeliminasi data yang tidak relevan sehingga memungkinkan peneliti memperoleh representasi yang lebih akurat terhadap fenomena yang diteliti. Melalui tahapan ini, peneliti melakukan seleksi, pengelompokan, serta penarikan inti sari dari sejumlah besar data dan informasi yang diperoleh selama proses penelitian. Aktivitas reduksi data senantiasa diarahkan oleh tujuan penelitian yang hendak dicapai. Dalam konteks penelitian kualitatif, orientasi utama terletak pada makna dan temuan substantif. Oleh sebab itu, apabila peneliti menemukan data yang bersifat unik, tidak lazim, atau tidak menunjukkan pola tertentu, maka aspek tersebut justru menjadi fokus perhatian utama dalam proses reduksi karena berpotensi mengandung temuan penting.

2. Penyajian Data *(Data Display)*

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan melalui berbagai bentuk representasi, seperti tabel, grafik, maupun deskripsi naratif yang ringkas namun informatif. Data yang disajikan dapat bersumber dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang telah dikumpulkan. Tahap ini bertujuan untuk mengorganisasikan serta menyusun data secara sistematis sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan menyeluruh terhadap objek penelitian. Dengan demikian, penyajian data tidak hanya terbatas pada uraian naratif semata, melainkan juga dikemas dalam bentuk visual yang memudahkan interpretasi. Melalui proses ini, peneliti dapat memahami pola, hubungan, serta kecenderungan data secara lebih jelas, sehingga mendukung langkah analisis lanjutan berdasarkan pemahaman yang telah terbentuk

sebelumnya.

3. Menyimpulkan *(Conclusion Drawing/Verification)*

Tahapan final dalam kerangka analisis data menurut Miles dan Huberman, yang menekankan pentingnya proses penarikan makna sekaligus verifikasi atas temuan penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan akumulasi data empiris yang telah divalidasi, sehingga memiliki derajat keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses ini tidak bersifat statis, melainkan dinamis, karena peneliti secara berkelanjutan melakukan peninjauan ulang, pengujian, dan penyempurnaan terhadap data dengan cara menelusuri kemungkinan adanya informasi tambahan yang relevan guna memperkuat konstruksi kesimpulan akhir. Dalam konteks penelitian kualitatif, hasil yang diperoleh kerap menghadirkan kebaruan (novelty), baik dalam bentuk deskripsi mendalam, interpretasi konseptual, maupun representasi fenomena yang sebelumnya tidak terjelaskan atau masih samar, hingga akhirnya menjadi lebih terang dan terartikulasikan secara sistematis setelah melalui proses penelitian.[43]

Langkah pertama, proses analisis dilakukan melalui beberapa langkah terstruktur. Pertama, peneliti melakukan reduksi data dengan menyeleksi, memfokuskan, serta menyederhanakan seluruh informasi yang diperoleh dari lapangan, khususnya data yang memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian, yakni efektivitas pengawasan BPOM Aceh terhadap peredaran bahan pangan yang mengandung formalin di Kota Banda Aceh. Kedua, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk yang terorganisasi dan sistematis

[43] rachman Et Al., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif DAN R&D*. Hlm 345

berdasarkan fakta empiris, kemudian dianalisis secara interpretatif dengan mengaitkannya pada kerangka teori yang relevan. Ketiga, peneliti merumuskan kesimpulan akhir sebagai sintesis dari keseluruhan temuan lapangan, yang merepresentasikan hasil analisis secara komprehensif dan mendalam.

3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memastikan bahwa data dalam studi kualitatif tergolong valid, triangulasi sumber, teknik, dan waktu dapat dilakukan.[44]

1. Triangulasi Sumber

   Untuk melakukan triangulasi sumber, peneliti harus memeriksa dan memastikan data yang mereka peroleh dari berbagai sumber. Setelah itu, data tersebut dideskripsikan, disimulasikan, dan dipilah mana perspektif yang sama. Selanjutnya peneliti mengambil kesimpulan dari perbandingan sumber-sumber ini.

[44] "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RD - 2017," accessed January 29, 2026, https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/206060/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-r-d.html.hlm 273

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh merupakan salah satu entitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang beroperasi di bawah koordinasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, dengan mandat spesifik dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan pada lingkup wilayah Provinsi Aceh. Secara struktural administratif maupun operasional, institusi ini berlokasi di pusat pemerintahan provinsi, yakni Kota Banda Aceh, dengan alamat di Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam.

Eksistensi BBPOM di Banda Aceh memiliki signifikansi strategis mengingat posisi kota tersebut sebagai episentrum pemerintahan sekaligus aktivitas ekonomi di Aceh, yang berdampak pada tingginya intensitas peredaran dan distribusi produk obat serta makanan. Dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugasnya, lembaga ini turut difasilitasi dengan sarana komunikasi resmi, termasuk layanan telepon dan faksimile, guna memperkuat koordinasi serta optimalisasi pelayanan publik di bidang pengawasan. Sebagai bagian inheren dari sistem kelembagaan BPOM, BBPOM Banda Aceh menjalankan fungsi dan kewenangannya berdasarkan kerangka regulatif yang ditetapkan dalam Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM.

Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap UPT BPOM mengemban tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan teknis operasional dalam bidang pengawasan obat dan makanan secara selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

perundang-undangan yang berlaku.[45]

Gambar 1 1 Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh di Provinsi Aceh

Ruang lingkup operasional Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh mencakup seluruh wilayah Provinsi Aceh, yang secara astronomis terletak pada koordinat 01°58’37,2” hingga 06°04’33,6” Lintang Utara serta 94°57’57,6” hingga 98°17’13,2” Bujur Timur, dengan elevasi rerata sekitar 125 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, kawasan ini berbatasan di sisi utara dan timur dengan Selat Malaka, di bagian selatan dengan Provinsi Sumatera Utara, serta di sisi barat dengan Samudera Hindia.

\Mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2024 mengenai struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, wilayah pengawasan Balai Besar POM Banda Aceh meliputi 13 daerah administratif yang terdiri atas 9 kabupaten dan

[45] “Profil | Balai Besar POM Di Banda Aceh,” accessed April 24, 2026, https://aceh.pom.go.id/profil.

4 kota. Dari keseluruhan wilayah tersebut, terdapat satu daerah yang memiliki karakteristik kepulauan, yakni Kota Sabang.

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berlandaskan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki mandat untuk menjalankan fungsi teknis operasional dalam bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerjanya masing-masing, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka pelaksanaan mandat tersebut, Balai Besar POM di Banda Aceh mengemban sejumlah fungsi sebagaimana dirinci dalam Pasal 4 peraturan dimaksud, yang meliputi:

a. Perumusan serta penyusunan rencana strategis, program kerja, dan pengalokasian anggaran dalam lingkup pengawasan obat dan makanan;
b. Pelaksanaan inspeksi terhadap sarana produksi obat dan makanan;
c. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat dan makanan, termasuk fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. Pelaksanaan proses sertifikasi baik terhadap produk maupun sarana produksi dan distribusi obat serta makanan;
e. Pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel (sampling) terhadap obat dan makanan;
f. Pelaksanaan pengawasan terhadap pencantuman label serta penyebaran iklan obat dan makanan;

جامعة الرانري
AR-RANIRY

g. Pelaksanaan pengujian rutin terhadap obat dan makanan;
h. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam konteks investigasi maupun proses penyidikan;
i. Pelaksanaan upaya pencegahan dan penindakan, termasuk kegiatan intelijen serta penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
j. Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui media siber;
k. Pengelolaan kegiatan komunikasi, penyebaran informasi, edukasi, serta penanganan pengaduan masyarakat terkait pengawasan obat dan makanan.

Dengan demikian, BBPOM tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai ujung tombak dalam memastikan implementasi kebijakan pengawasan berjalan secara efektif di tingkat daerah. Dalam sistem kelembagaan BPOM, terdapat klasifikasi Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM), Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM), serta Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM). Klasifikasi ini menunjukkan perbedaan kapasitas, cakupan wilayah kerja, serta kompleksitas tugas yang diemban oleh masing-masing unit.

BBPOM di Banda Aceh termasuk dalam kategori Balai Besar, yang berarti memiliki lingkup kerja yang lebih luas serta fasilitas dan kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan unit lainnya. Secara umum, tugas utama

BBPOM di Banda Aceh adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya. Tugas ini mencakup berbagai aspek yang saling terintegrasi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Kegiatan sertifikasi terhadap produk maupun sarana produksi dan distribusi juga menjadi bagian penting dalam menjamin bahwa seluruh proses yang dilakukan oleh pelaku usaha telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam rangka pengawasan yang lebih konkret, BBPOM melakukan pengambilan sampel (sampling) dan pengujian rutin terhadap produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Lebih lanjut, BBPOM juga memiliki peran dalam melakukan pengujian khusus dalam rangka investigasi dan penyidikan apabila ditemukan dugaan pelanggaran. Kegiatan intelijen dan penegakan hukum juga menjadi bagian dari fungsi BBPOM, terutama dalam menangani kasus-kasus pelanggaran yang berkaitan dengan peredaran produk ilegal atau tidak memenuhi standar.[46]

Di sisi lain, BBPOM juga memegang peranan strategis dalam mengelola arus komunikasi, diseminasi informasi, serta pelaksanaan edukasi publik, sekaligus berfungsi sebagai kanal penerimaan dan tindak lanjut atas berbagai pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan aspek keamanan produk obat dan makanan. Dalam mengemban mandat tersebut, BBPOM tidak beroperasi secara independen, melainkan secara aktif membangun sinergi melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, mencakup instansi

[46] "Profil | Balai Besar POM Di Banda Aceh."

pemerintahan, pelaku usaha, hingga elemen masyarakat luas. Selain itu, aktivitas pengawasan tidak terlepas dari mekanisme monitoring, evaluasi, serta pelaporan yang dilakukan secara periodik guna menjamin bahwa seluruh implementasi program berjalan selaras dengan sasaran yang telah dirumuskan.

Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang pengawasan, BBPOM di Banda Aceh menjadi salah satu institusi yang berada di garis terdepan dalam memastikan keamanan, mutu, dan kelayakan produk yang beredar di masyarakat. Peran tersebut tidak hanya berfokus pada pelaksanaan dan penegakan aturan, tetapi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari risiko penggunaan produk yang tidak memenuhi standar kesehatan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan BBPOM di Banda Aceh memiliki kontribusi yang besar dalam menjaga kesehatan serta keselamatan masyarakat, khususnya melalui upaya pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar di Provinsi Aceh.alam menjaga derajat kesehatan serta keselamatan masyarakat di Provinsi Aceh.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4.1.3 Struktur BBPOM Aceh

Struktur organisasi BBPOM Aceh[47]

Gambar 1 2 Sturktur Organisasi[1]

Sumber Daya Manusia Balai Besar POM di Banda Aceh per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 88 orang (71 orang PNS dan 8 orang PPPK). Balai Besar POM di Banda Aceh juga dibantu oleh 9 orang PPNPN dan 20 orang tenaga *outsourcing* terdiri dari 6 orang satpam, 4 orang supir, 5 orang *cleaning service*, 2 orang pemelihara sarpras, dan 3 orang petugas pelayanan (*front office*). Dari total 108 orang pegawai, terdiri dari 66 orang wanita (61.11%) dan 42 orang pria (38.89%).

[47] "Profil | Balai Besar POM Di Banda Aceh."

4.1.4 Visi dan Misi BBPOM

Dalam pelaksanaan peran, kewenangan, serta tanggung jawab institusionalnya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh senantiasa mengacu dan berlandaskan pada kerangka visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai pedoman strategis utama.[48]

Gambar 1 3 Visi dan Misi BPOM

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis efektifitas Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Aceh Terhadap Pengawasan Bahan Makan dengan tiga indikator utama: pencapaian tujuan, Integrasi (Koordinasi), dan Adaptasi (Kemampuan Operasional).

[48] "Profil | Balai Besar POM Di Banda Aceh."

4.2.1 Pencapaian Tujuan Pengawasan Bahan Makanan

Pencapaian tujuan dipandang sebagai proses, bukan hanya hasil akhir, sehingga langkah-langkah, prosedur, dan kebijakan yang digunakan juga dianggap penting.

1. Tingkat keberhasilan program

   BBPOM menjelaskan bahwa penentuan lokasi pengawasan biasanya juga berasal dari laporan atau pengaduan masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan informasi terkait dugaan adanya bahan makanan yang mengandung formalin.

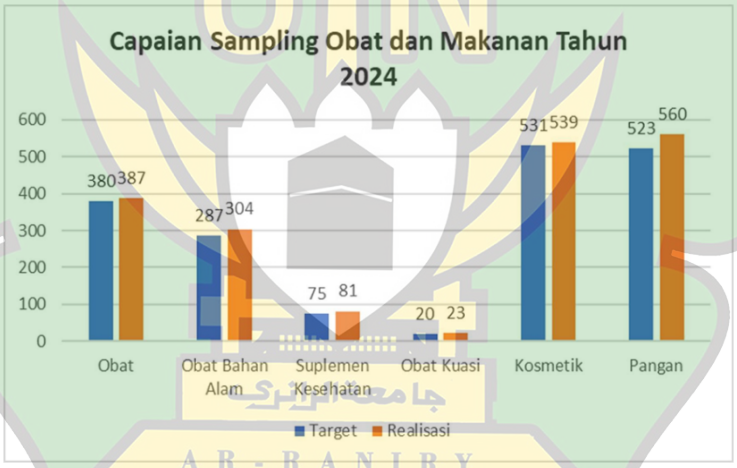

Gambar 1 4 Grafik Capaian Sampling Obat dan Makanan

Lokasi dan sasaran pengawasan ditentukan berdasarkan analisis risiko sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian. Pengawasan difokuskan pada:

- Sarana produksi dan distribusi pangan (pasar, retail, IRTP)

- Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah Aman (pengujian jajanan anak sekolah/PJAS)
- Kegiatan intensifikasi pada momen khusus seperti Ramadan (takjil), tahun baru, dan kunjungan kenegaraan (*food security*)
- Produk yang dicurigai berdasarkan laporan masyarakat dan hasil investigasi fungsi penindakan[49]

Pengawasan khusus difokuskan pada sarana produksi dan distribusi pangan di Banda Aceh, termasuk pasar tradisional, retail modern, dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Selain itu, ditekankan pula pengawasan dalam Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah Aman dengan melakukan pengujian jajanan anak sekolah (PJAS) untuk memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi pelajar. Pada momen-momen tertentu seperti Ramadan (takjil), tahun baru, dan kunjungan kenegaraan, dilakukan kegiatan intensifikasi pengawasan guna mendukung aspek *food security* dan keamanan penyajian makanan.

Terakhir, pengawasan juga menyasar produk yang dicurigai berdasarkan laporan masyarakat dan hasil investigasi fungsi penindakan, sehingga respons terhadap indikasi pelanggaran atau bahaya menjadi lebih cepat dan tepat sasaran.

[49]. Hasil wawancara dengan ibu Suryani Fauzi, SKM, M.Si. Bidang Infokom BBPOM, Rabu, jam 14:30

Secara umum, pengawasan pangan di Banda Aceh dirancang berbasis risiko dan berfokus pada titik rawan, baik dari sisi tempat (sarana produksi dan distribusi), kelompok konsumen (anak sekolah), momen khusus, maupun produk yang mendapat sorotan publik. Pendekatan ini menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan terencana untuk menjaga keamanan pangan dan perlindungan konsumen sesuai pedoman BBPOM.

2. Efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan hasil wawancara, daerah yang masih dianggap rawan ditemukan bahan makanan yang mengandung formalin adalah di pasar. Selain itu, banyaknya jalur alternatif atau 'jalan tikus' juga menjadi faktor yang mempermudah peredaran bahan pangan yang tidak terawasi dengan baik.

Berdasarkan data tahun 2025:

- Program Nasional (hasil uji konfirmasi dari test kit lapangan), ditemukan 9 barang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dari berbagai parameter termasuk formalin dan boraks
- Dari 4 barang investigasi/penyidikan pangan, ditemukan TMS Boraks pada kerupuk tempe produksi Banda Aceh[50]

Secara umum temuan formalin sangat minim; pelanggaran yang masih ditemukan lebih dominan pada *boraks* (kerupuk tempe) di Banda Aceh, bukan formalin. Untuk temuan yang mengandung

[50] . Hasil wawancara dengan ibu Suryani Fauzi, SKM, M.Si. Rabu, jam 14:30

Formalin tahun 2025 Nihil.

Pengawasan keamanan pangan tahun 2025 efektif dalam mencegah kontaminasi formalin, dengan nol temuan positif, serta berhasil menjaga 100% kepatuhan pada sampel food security, takjil, dan DAK. Namun, masih ada celah pada Program Nasional (43% TMS) dan investigasi (25% TMS boraks), menandakan perlunya penguatan monitoring pada produk berisiko tinggi seperti kerupuk.

3. Kesesuaian hasil dengan target

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan target pengawasan terhadap formalin pada bahan makanan. Dalam praktiknya, BPOM juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Namun, untuk penanganan penggunaan bahan makanan yang mengandung formalin, peran tersebut lebih banyak ditangani oleh pihak Dinas Kesehatan dan untuk itu BBPOM lebih banyak menangani produk makanan siap saji dan jenis makanan olahan.[51]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Target sampling pangan tahun 2025 berhasil melampaui sasaran yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 100,5%, yaitu realisasi sebanyak 357 dari target awal 355. Pencapaian ini tidak hanya menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan berjalan sesuai rencana, tetapi juga mencerminkan adanya kinerja yang optimal dan komitmen tinggi dari seluruh tim pelaksana dalam memastikan mutu

[51]. Hasil wawancara dengan ibu Suryani Fauzi, SKM, M.Si. Rabu, jam 14:30

dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.

Keberhasilan melampaui target tersebut mengindikasikan bahwa perencanaan yang dilakukan telah disusun secara matang, didukung oleh strategi pelaksanaan yang efektif serta koordinasi yang baik antar pihak terkait. Selain itu, capaian ini juga mencerminkan responsivitas petugas di lapangan dalam mengidentifikasi dan menjangkau objek pengawasan secara lebih luas, sehingga jumlah sampel yang diperoleh mampu melebihi ekspektasi awal.

Dengan demikian, capaian sebesar 100,5% ini tidak hanya dipandang sebagai keberhasilan semata, tetapi juga sebagai indikator efektivitas pelaksanaan program, kualitas kinerja sumber daya manusia, serta komitmen institusi dalam menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan akuntabel. Ke depan, capaian ini diharapkan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan terus memperkuat perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan pengawasan pangan secara terpadu.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Pengawasan pangan 2025 efektif dengan pencapaian over-target dan koordinasi lintas instansi yang solid. Fokus BPOM pada makanan olahan/siap saji melengkapi peran Dinas Kesehatan untuk formalin, menghasilkan sistem pengawasan yang komprehensif dan sesuai rencana.

4. Produktivitas organisasi

Berdasarkan wawancara dengan para pedagang makanan di pasar lamdingi kota Banda Aceh, pada 20 April 2026, pengawasan BPOM secara umum memberikan dampak positif terhadap penjualan mereka.[52] Salah satu pedagang mie kuning, mengaku awalnya khawatir saat sampelnya diambil BPOM, tetapi setelah lolos uji dan terbukti bebas boraks, penjualannya justru naik 20-30% karena pembeli semakin percaya pada kualitas produknya; ia kini sepenuhnya beralih ke bahan aman untuk menjaga stabilitas omzet.[53]

Untuk melakukan pengawasan biasanya bpom melalui tim yang sudah terbentuk yaitu namanya kegiatan sanger (sering pengawasan aneuk nanggroe) melalui tim tersebut BPOM melakukan pengawasan seperti pada warung kopi dan pada lain-lainnya[54]

Pelaksanaan pengawasan bahan makanan yang dilakukan oleh BPOM memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Hal ini tercermin dari capaian target sampling tahun 2025 yang tercapai. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas pengawasan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mampu melampaui target yang ditetapkan, sehingga memperluas cakupan pengendalian terhadap produk pangan.

Dari aspek perlindungan konsumen, pengawasan yang intensif

---

[52]. Hasil wawancara dengan bidang Infokom BBPOM ibu Suryani Fauzi, SKM, M.Si. Rabu, jam 14:30

[53], Hasil wawancara dengan pedagang ibu Fat. Jumat, jam 10:15

[54]. Hasil wawancara dengan pedagang ikan asin. Selasa, jam 08:30

berdampak pada meningkatnya jaminan keamanan pangan. Semakin banyak sampel yang diuji memberikan peluang lebih besar untuk mendeteksi produk yang tidak memenuhi standar, seperti pangan yang mengandung bahan berbahaya, tidak memiliki izin edar, atau tidak memenuhi ketentuan label. Dengan demikian, masyarakat memperoleh perlindungan yang lebih optimal dari risiko kesehatan akibat konsumsi pangan yang tidak aman.[55]

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan jangkauan pengawasan di wilayah tertentu dan masih adanya pelaku usaha yang belum sepenuhnya patuh terhadap regulasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pengawasan, termasuk peningkatan frekuensi sampling, pemanfaatan teknologi, serta edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan bahan makanan oleh BPOM telah memberikan dampak positif yang nyata, baik dalam meningkatkan keamanan pangan, kepatuhan pelaku usaha, kinerja kelembagaan, maupun kepercayaan masyarakat. Capaian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan tergolong efektif, meskipun tetap memerlukan perbaikan dan penguatan secara berkelanjutan.

4.2.2 Integrasi (Koordinasi)

[55]. Hasil wawancara dengan pedagang ibu Sufni. Jumat, jam 09:10

1. Tingkat kerjasaman antar unit

Berdasarkan hasil wawancara, kerja sama antara BPOM dengan instansi lain dalam pengawasan pangan sudah berjalan dengan cukup baik. BPOM biasanya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan di lapangan. Kerja sama ini dilakukan melalui kegiatan pengawasan, seperti pemeriksaan langsung ke pasar dan tempat penjualan pangan. Dengan adanya kolaborasi tersebut, pengawasan pangan menjadi lebih efektif karena masing-masing instansi memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi.[56]

Pada tahun 2025, BBPOM di Banda Aceh memiliki 22 kerjasama aktif (MoU/PKS). Tiga kerjasama baru yang ditandatangani:

NO	Kerjasama	Ket
1	Polda Aceh	Peningkatan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi (termasuk pengawasan dan penyidikan pangan berbahaya)
2	Pemerintah Kota Langsa	Pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP)
3	Pemerintah Kabupaten	Pelayanan public Mal Pelayanan Publik (MPP) dimulai tahun 2022- 2027

[56]. Hasil wawancara dengan bidang Infokom BBPOM ibu Suryani Fauzi, SKM, M.Si. Rabu, jam 14:30

	Aceh Barat	
4	Pemerintah Kota Banda Aceh	Pelayanan public Mal Pelayanan Publik (MPP) dimulai tahun 2024-2027

Terdapat 9 Kabupaten / Kota yang sudah terbentuk SK TKPPOM (Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jaya, Sabang, Aceh Barat, Langsa, Bireueun, Aceh Timur) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai Ketua Dua.[57]

Selain itu, BBPOM berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (pengiriman sampel DAK dan penanganan KLB keracunan), Kwartir Pramuka melalui Inovasi Sangeur (pengujian test kit di warung kopi) dan Podcast JANET yang melibatkan narasumber dari Lintas sektor, dan lintas sektor lainnya dalam program Pasar Pangan Aman Program Desa Pangan Aman (GKPD), PJAS dan Kabupaten Kota Pangan Aman yang melibatkan lintas sektor sesuai PP 86 ahun 2029.[58]

Pada tahun 2024 Balai Besar POM di Banda Aceh telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan mitra kerja menghasilkan 1 dokumen baru yang disepakati, yaitu:

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ubudiyah Indonesia dengan judul

[57] "Profil | Balai Besar POM Di Banda Aceh," accessed April 27, 2026, https://aceh.pom.go.id/profil.

[58]. Hasil wawancara dengan bidang Infokom BBPOM ibu Suryani Fauzi, SKM, M.Si. Rabu, jam 14:30

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Keamanan serta Mutu Obat dan Makanan, jangka waktu 5 tahun setelah ditandatanganinya PKS tersebut berakhir pada tahun 2029.[59]

Sehingga sepanjang tahun 2024 terdapat 19 kerjasama yang masih berlaku dan dilakukan monitoring dan evaluasi efektivitas kerjasama di aplikasi Sikes Badan POM *https://kerjasamahumas.pom.go.id/ sikes.* Uraian lebih lengkap mengenai jangka waktu, judul kerja sama.

2 Sosialisasi dan kejelasan tugas

Terkait pelaksanaan sosialisasi tentang bahayanya penggunaan bahan makan yang mengandung formalin biasanya BBPOM mengadakan kegiatan pasar aman Dalam pelaksanaannya,dan bintek, BPOM juga menjalin kerja sama dengan Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) karena instansi tersebut memiliki peran dalam pengelolaan pasar. Melalui kerja sama ini, sosialisasi dapat dilakukan lebih luas dan pengawasan di pasar menjadi lebih terarah.

Sosialisasi dilaksanakan melalui berbagai skema:

- KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) langsung kepada pelaku usaha dan pedagang
- Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas – edukasi pedagang pasar secara langsung
- SAPA Sekolah sosialisasi keamanan pangan di lingkungan sekolah

[59]. Laporan tahunan BPOM 2024

- Bimbingan Teknis (Bimtek) keamanan pangan kepada kader dan pelaku UMKM
- Pengujian sederhana dengan test kit di lapangan (pasar, warung kopi, lokasi takjil) disertai edukasi langsung di tempat
- Sosialisasi melalui media sosial (Instagram, Facebook, X/Twitter) Balai Besar POM Aceh
- Mal Pelayanan Publik (MPP) di 4 kota sebagai sarana konsultasi dan edukasi masyarakat.[60]

Berdasarkan hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi keamanan pangan yang dilakukan telah berjalan secara komprehensif, adaptif, dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Penggunaan berbagai metode, baik tatap muka, praktik langsung, maupun digital, menunjukkan adanya strategi yang terintegrasi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait keamanan pangan.

Pendekatan yang variatif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penyampaian informasi, tetapi juga memperkuat partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung terciptanya pangan yang aman. Dengan demikian, sosialisasi yang dilakukan dapat dinilai efektif sebagai upaya preventif dalam pengawasan pangan,

[60]. Hasil wawancara dengan bidang Infokom BBPOM ibu Suryani Fauzi, SKM, M.Si. Rabu, jam 14:30

meskipun tetap memerlukan penguatan keberlanjutan dan perluasan jangkauan agar dampaknya semakin optimal di masa mendatang.[61]

3. Rendahya konflik organisasi

Sanksi yang diterapkan berjenjang:

- Pembinaan teknis (teguran lisan/tertulis)
- Surat Peringatan (SP) untuk pelanggaran pertama
- Surat Peringatan Keras untuk pelanggaran berulang atau berat
- Pemusnahan produk yang tidak memenuhi ketentuan
- Penyidikan hingga ke pengadilan (melalui fungsi penindakan/PPNS) untuk efek jera.[62]

Pada tahun 2025, ditemukan pelanggaran bahan berbahaya (boraks) pada kerupuk, barang yang lansung dari Aceh khususnya di Banda Aceh tidak menggunakan boraks hanya saja ada beberapa barang dari Medan yang masih menguunakan formalin dan sejenisnya. dan ditindaklanjuti dengan peringatan keras dan pemusnahan produk.[63]

Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui BBPOM di Banda Aceh menerapkan sistem sanksi yang bersifat berjenjang dan proporsional. Tahapan sanksi dimulai dari pendekatan persuasif berupa pembinaan teknis, baik melalui teguran lisan maupun

[61]. Hasil wawancara dengan pedagang ibu Fat. Jumat, jam 10:15

[62]. Hasil wawancara dengan bidang Infokom BBPOM ibu Suryani Fauzi, SKM, M.Si. Rabu, jam 14:30

[63]. Hasil wawancara dengan pedagang ikan asin. Selasa, jam 08:30

tertulis. Apabila pelanggaran tetap terjadi, maka diberikan Surat Peringatan (SP) sebagai bentuk penegasan terhadap pelanggaran pertama.[64]

Untuk pelanggaran yang berulang atau tergolong berat, sanksi ditingkatkan menjadi Surat Peringatan Keras, yang dapat diikuti dengan tindakan tegas seperti pemusnahan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Dalam kasus tertentu yang memiliki dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, penanganan dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), hingga proses hukum di pengadilan, sebagai upaya memberikan efek jera.

Berdasarkan keseluruhan hasil temuan dari aspek sosialisasi, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta penegakan sanksi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan keamanan pangan oleh BPOM, khususnya BBPOM di Banda Aceh, telah berjalan secara cukup efektif dengan pendekatan yang komprehensif. Efektivitas ini didukung oleh strategi sosialisasi yang luas, kapasitas SDM yang memadai, penggunaan teknologi pengujian yang cukup baik, serta sistem penegakan sanksi yang jelas dan berjenjang.[65]

Pendekatan pembinaan yang diutamakan menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Namun

[64]. Hasil wawancara dengan bidang Infokom BBPOM ibu Suryani Fauzi, SKM, M.Si. Rabu, jam 14:30

[65]. Hasil wawancara dengan pedagang ikan asin. Selasa, jam 08:30

demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum optimalnya pemenuhan sarana laboratorium, keterbatasan distribusi SDM di wilayah tertentu, serta luasnya cakupan wilayah pengawasan. Selain itu, masih ditemukannya pelanggaran menunjukkan bahwa upaya pengawasan perlu terus diperkuat.[66]

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan ke depan, diperlukan penguatan secara menyeluruh melalui peningkatan fasilitas laboratorium, penambahan dan pemerataan SDM, perluasan wilayah kerja, serta konsistensi dalam penerapan sanksi. Kombinasi antara pendekatan edukatif dan penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan pangan yang lebih optimal, berkelanjutan, dan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

4.2.3 Adaptasi (Kemampuan Operasional) Kecukupan SDM

1. Fleksibilitas kebijakan dan struktur

Total SDM BBPOM di Banda Aceh per 31 Desember 2025 adalah 89 orang (72 PNS + 17 PPPK), ditambah 19 tenaga outsourcing. Laboratorium pengujian didukung 34 orang tenaga penguji dengan kapasitas rata-rata 503 sampel/penguji.

Namun demikian, laporan menyatakan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang, direkomendasikan pembentukan wilayah kerja

[66]. Hasil wawancara dengan pedagang ibu Fat dan Ibu Sufni. Jumat 10:40

POM baru, mengindikasikan jumlah petugas masih perlu diperkuat untuk cakupan wilayah yang optimal.[67]

Dengan demikian, meskipun kapasitas laboratorium dan kompetensi tenaga penguji sudah tergolong baik, keterbatasan jumlah personel di lapangan serta luasnya wilayah kerja menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan secara keseluruhan.

Berdasarkan keseluruhan hasil temuan, baik dari aspek sosialisasi maupun sumber daya manusia, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan edukasi keamanan pangan oleh BPOM telah berjalan secara efektif dan didukung oleh kapasitas SDM yang cukup memadai, khususnya dalam aspek teknis pengujian laboratorium.

Namun, efektivitas tersebut masih menghadapi kendala dalam hal pemerataan jangkauan pengawasan, terutama di wilayah yang secara geografis luas dan memiliki keterbatasan akses. Kebutuhan akan penambahan wilayah kerja baru menunjukkan bahwa penguatan jumlah dan distribusi SDM masih menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan secara menyeluruh, diperlukan strategi penguatan kelembagaan melalui penambahan unit kerja, optimalisasi distribusi SDM, serta

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[67]. Hasil wawancara dengan bidang Infokom BBPOM ibu Suryani Fauzi, SKM, M.Si. Rabu, jam 14:30

peningkatan dukungan operasional di wilayah-wilayah yang belum terjangkau secara maksimal. Dengan langkah tersebut, diharapkan pengawasan pangan dapat dilakukan secara lebih merata, responsif, dan berkelanjutan.

2 Kemampuan inovasi

Berdasarkan hasil wawancara, sarana dan prasarana pengawasan yang dimiliki oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Balai Besar POM di Banda Aceh tergolong cukup memadai dan terus mengalami peningkatan. Dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan, BBPOM telah dilengkapi dengan test kit rapid test yang digunakan untuk mengidentifikasi kandungan berbahaya seperti formalin dan boraks secara cepat. Keberadaan alat ini memungkinkan deteksi awal dilakukan secara langsung di lokasi, sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan terhadap sampel yang dicurigai.[68]

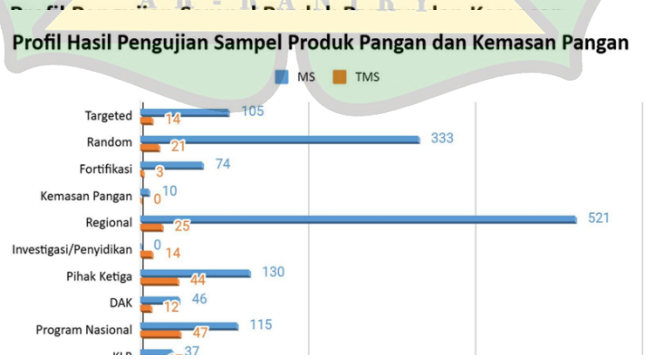

Gambar 1 5 Profil Hasil Pengujian Produk Pangan dan Kemasan Pangan

[68]. Hasil wawancara dengan bidang Infokom BBPOM ibu Suryani Fauzi, SKM, M.Si. Rabu, jam 14:30

Untuk alat uji formalin yaitu teskip sudah cukup untuk BPOM di banda aceh namun pada balai bpom lainnya belum tercukupi dikarenakan adanya efisiensi anggaran.untuk pembagian daeran balai bpom ada 23 namanya loka pom ,ada di banda aceh ada 13 kabupaten,balai pom aceh tengah 5,dan balai pom aceh selatan 5.

BBPOM di Banda Aceh memiliki test kit rapid test untuk identifikasi formalin dan boraks di lapangan, serta laboratorium terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 untuk uji konfirmasi. Pemenuhan standar peralatan laboratorium tahun 2025 mencapai 79,6%. Pengadaan alat terus dilakukan, namun pemenuhan standar minimal laboratorium masih belum 100%, sehingga masih dalam proses peningkatan sarana. Kebutuhan alat uji formalin untuk pengujian sampel di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tersedia cukup.[69]

Berdasarkan keseluruhan hasil temuan dari aspek sosialisasi, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan keamanan pangan oleh BPOM, khususnya BBPOM di Banda Aceh, telah berjalan secara cukup efektif dan didukung oleh berbagai komponen yang saling melengkapi. Ketersediaan SDM yang kompeten, dukungan laboratorium terakreditasi, serta penggunaan teknologi seperti rapid test kit menjadi faktor utama yang memperkuat efektivitas pengawasan, baik di

[69] "Profil | Balai Besar POM Di Banda Aceh."

lapangan maupun di laboratorium.

NO SARANA	JENIS SARANA	JUMLAH	
Sarana Distribusi			
1.	PBF	27	**Sarana**
2.	Apotek	411	**Sarana**
3.	Toko Obat	474	**Sarana**
4.	Klinik	239	**Sarana**
5.	Rumah Sakit	62	**Sarana**
6.	Puskesmas	306	**Sarana**
7.	GFK	17	**Sarana**
8.	Distribusi Makanan	2289	**Sarana**
9.	Distribusi Kosmetik dan Salon	901	**Sarana**
10.	Distribusi OT dan Suplemen Kesehatan	320	**Sarana**
	TOTAL SARANA DISTRIBUSI	**5046**	Sarana
Sarana Produksi			
1.	Industri Farmasi	0	**Sarana**
2.	Industri Obat Tradisional	0	**Sarana**
3.	UMOT	18	**Sarana**
4.	UKOT	11	**Sarana**
5	Industri Kosmetik	7	**Sarana**
6.	Industri Makanan (MD)	83	**Sarana**
7.	PIRT	1469	**Sarana**
	TOTAL SARANA PRODUKSI	1588	Sarana

Selain itu, strategi sosialisasi yang beragam juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta pelaku usaha. Namun demikian, efektivitas tersebut masih belum optimal secara menyeluruh. Beberapa kendala yang masih dihadapi meliputi belum terpenuhinya standar peralatan laboratorium secara penuh, keterbatasan jumlah dan distribusi SDM di wilayah tertentu, serta

luasnya cakupan wilayah pengawasan.[70]

Hal ini menunjukkan perlunya penguatan lebih lanjut, baik dari sisi sarana, prasarana, maupun kelembagaan. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan dalam pemenuhan standar fasilitas laboratorium, penambahan dan pemerataan SDM, serta penguatan wilayah kerja baru.[71] Langkah ini diharapkan mampu mendukung terciptanya sistem pengawasan pangan yang lebih optimal, merata, dan berkelanjutan dalam melindungi kesehatan masyarakat.

3 Respon terhadap perubahan

BBPOM di Banda Aceh menyediakan layanan pengaduan melalui:

- Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) di kantor dan 4 MPP
- Online: media sosial, website aceh.pom.go.id, SP4N-LAPOR! (lapor.go.id)
- Hotline: 08116853301

Tahun 2025 tercatat 8 pengaduan dan 138 layanan informasi yang seluruhnya diselesaikan. SLA penyelesaian layanan adalah 17 hari kerja. Laporan mengakui bahwa jumlah pengaduan masih rendah dan merekomendasikan peningkatan sosialisasi agar masyarakat lebih

[70]. Hasil wawancara dengan pedagang ibu Sufni. Jumat, jam 09:20
[71]. Hasil wawancara dengan pedagang ikan asin. Selasa, jam 08:30

aktif melapor.

Respon bpom terhadap laporan masyarakat diterima dengan baik dan dilakukan pengawasan di daerah yang dilapor dan untuk pelapor bpom tetap menjaga privasi masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil temuan, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan pengaduan dan informasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2025 tergolong efektif dan responsif. Hal ini terlihat dari seluruh pengaduan (8 kasus) dan layanan informasi (138 layanan) yang berhasil diselesaikan dengan tingkat penyelesaian mencapai 100% serta sesuai dengan standar waktu layanan (SLA) yaitu 17 hari kerja.

Selain itu, respons BPOM terhadap laporan masyarakat dinilai baik, dengan tindak lanjut berupa pengawasan langsung ke lokasi yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dalam menindaklanjuti setiap aduan secara serius. Di sisi lain, BPOM juga menjaga kerahasiaan identitas pelapor, yang menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengaduan. Namun demikian, jumlah pengaduan yang masih relatif rendah mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan permasalahan keamanan pangan masih belum optimal.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kegiatan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat lebih sadar dan berani melaporkan temuan atau dugaan pelanggaran.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4.3 Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian terkait efektivitas pengawasan keamanan pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM di Banda Aceh), diperoleh beberapa temuan utama sebagai berikut:

1. Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan

   Pelaksanaan program pengawasan keamanan pangan sepanjang tahun 2025 secara keseluruhan menampilkan kinerja yang luar biasa efektif, yang paling kentara terlihat dari keberhasilan mencapai target pengambilan sampel hingga 100,5% yaitu realisasi 357 sampel melebihi rencana awal sebanyak 355 sampel. Keunggulan ini menggambarkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan pengawasan tidak hanya mengikuti jadwal dan prosedur yang telah dirancang dengan matang, melainkan juga berhasil melampaui harapan melalui berbagai strategi pendukung, seperti kolaborasi intensif antara BPOM dan Dinas Kesehatan yang memastikan pembagian tugas optimal di mana BPOM lebih memprioritaskan pengujian makanan olahan serta siap saji, sementara Dinas Kesehatan unggul dalam menangani kasus kontaminasi formalin.

   Selain itu, efektivitas ini diperkuat oleh temuan lapangan yang minim pelanggaran, seperti kasus boraks yang terbatas pada kerupuk tempe dari Banda Aceh, serta nihilnya deteksi formalin di berbagai kategori sampel termasuk food security, takjil Ramadan, dan DAK Dinas Kesehatan. Dampaknya, pengawasan

ini tidak hanya menjaga kualitas pangan bagi masyarakat Aceh, tetapi juga membangun kepercayaan pedagang seperti yang terungkap dari wawancara di mana penjualan mereka justru meningkat 15-50% setelah lolos uji serta mendorong adaptasi bisnis menuju bahan aman untuk keberlanjutan jangka panjang.

2. Strategi Sosialisasi yang Komprehensif

Program sosialisasi terkait keamanan pangan pada tahun 2025 dilaksanakan melalui beragam metode yang dirancang secara komprehensif, mencakup pendekatan langsung maupun tidak langsung untuk memastikan pesan edukasi meresap luas ke seluruh lapisan masyarakat. Secara langsung, kegiatan ini melibatkan intervensi tatap muka seperti KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) yang menargetkan komunitas lokal, SAPA Sekolah untuk membekali siswa dan guru dengan pengetahuan dasar pangan aman,

Pasar Pangan Aman yang mengedukasi pedagang pasar tradisional sambil mempromosikan praktik higienis, serta Bimtek (Bimbingan Teknis) yang memberikan pelatihan mendalam kepada pelaku usaha makanan olahan dan siap saji. Sementara itu, pendekatan tidak langsung dimanfaatkan melalui platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp grup komunitas untuk menyebarkan infografis, video singkat, serta tips pencegahan kontaminan seperti boraks dan formalin,

ditambah dengan kehadiran di Mal Pelayanan Publik yang memudahkan akses informasi bagi masyarakat umum.

Strategi terintegrasi ini tidak hanya menunjukkan komitmen kuat dalam membangun kesadaran kolektif, tetapi juga terbukti efektif dalam menjangkau kelompok rentan seperti pedagang kecil, orang tua, pelajar, dan konsumen sehari-hari di Aceh sebagaimana tercermin dari umpan balik wawancara pedagang yang merasakan peningkatan penjualan berkat pemahaman baru tentang standar BBPOM, serta dukungan data sampling 2025 yang over-target 100,5% dengan pelanggaran minim. Pendekatan multifaset ini pada akhirnya memperkuat ekosistem pangan aman, mendorong kepatuhan sukarela, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengawasan pangan secara berkelanjutan.

3. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pengawasan keamanan pangan tahun 2025 dinilai secara keseluruhan memadai dan mendukung pencapaian target sampling over 100,5%, dengan total 89 pegawai tetap yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ditambah bantuan signifikan dari tenaga outsourcing yang fleksibel dalam menangani lonjakan kegiatan lapangan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Komposisi ini diperkuat oleh keberadaan 34 tenaga penguji laboratorium yang terlatih, memungkinkan proses analisis sampel seperti deteksi boraks pada kerupuk tempe atau verifikasi nihil formalin berjalan cepat dan akurat, sehingga berkontribusi pada efektivitas pengawasan seperti yang terlihat dari 100% MS pada sampel food security, takjil Ramadan, dan DAK Dinas Kesehatan.

Meskipun demikian, tantangan utama terletak pada distribusi SDM yang belum merata di seluruh wilayah Aceh, di mana beberapa daerah prioritas seperti Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang mengalami kekurangan personel lapangan, menyebabkan potensi keterlambatan sampling atau sosialisasi di pasar tradisional dan usaha kecil menengah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan strategis melalui rekrutmen tambahan PPPK atau outsourcing lokal, rotasi personel antarwilayah, serta pelatihan berbasis digital agar tenaga existing lebih efisien sehingga selaras dengan umpan balik pedagang dari wawancara yang menekankan perlunya pengawasan lebih intensif untuk mempertahankan peningkatan penjualan pasca-lolos uji.

Langkah-langkah tersebut tidak hanya akan menyamakan beban kerja, tetapi juga meningkatkan jangkauan pengawasan hingga ke pelosok, mendukung ekosistem pangan aman yang berkelanjutan di Aceh.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4. Sarana dan Prasarana Pengujian

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh telah dilengkapi dengan fasilitas laboratorium yang telah memperoleh akreditasi resmi ISO/IEC 17025:2017, menjamin kualitas dan keandalan hasil pengujian yang menjadi tulang punggung keberhasilan pengawasan pangan 2025 seperti verifikasi nihil formalin di 73 sampel food security dan deteksi tepat sasaran boraks pada kerupuk tempe dari investigasi Banda Aceh.

Fasilitas ini didukung pula oleh beragam alat rapid test canggih untuk skrining awal bahan berbahaya, memungkinkan respon cepat di lapangan melalui test kit yang digunakan pada 21 sampel Program Nasional, sehingga mempercepat konfirmasi dan mencegah distribusi produk bermasalah. Meskipun demikian, tingkat pemenuhan standar peralatan laboratorium baru saat ini hanya mencapai 79,6%, yang berarti masih ada sekitar 20% kekurangan dalam hal kalibrasi, pemeliharaan, atau pengadaan instrumen mutakhir seperti spektrometer untuk analisis residu kimia lebih presisi.

Kekurangan ini berpotensi menghambat efisiensi throughput pengujian pada volume sampel tinggi (357 sampel terealisasi), terutama di wilayah terpencil seperti Aceh Timur atau Langsa di mana distribusi SDM juga menjadi isu. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan bertahap melalui alokasi anggaran DAK

untuk pengadaan peralatan baru, sertifikasi ulang rutin, dan integrasi teknologi digital seperti *software LIMS (Laboratory Information Management System)* guna mencapai standar optimal 100% sehingga tidak hanya memperkuat output pengawasan seperti 100% MS pada takjil dan DAK, tapi juga mendukung umpan balik positif dari pedagang yang mengalami peningkatan penjualan 15-50% berkat kepercayaan pada hasil lab BPOM.

Upaya ini akan menjadikan laboratorium BBPOM sebagai pusat unggulan yang adaptif, selaras dengan strategi sosialisasi terintegrasi melalui KIE, SAPA Sekolah, dan media sosial.

5. Pelayanan Pengaduan Masyarakat yang Responsif

Pada tahun 2025, penanganan seluruh pengaduan masyarakat serta layanan informasi terkait keamanan pangan oleh BBPOM Aceh mencatat kinerja prima dengan tingkat penyelesaian 100%, meliputi 8 kasus pengaduan resmi dan 138 permintaan informasi yang semuanya diproses tepat waktu sesuai standar *Service Level* Agreement (SLA) maksimal 17 hari kerja. Efisiensi ini menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan responsivitas tinggi, di mana setiap pengaduan seperti dugaan kontaminasi boraks atau formalin langsung diinvestigasi dengan kunjungan tim ke lokasi pelaporan, sebagaimana terbukti dari kasus kerupuk tempe Banda Aceh yang cepat ditindaklanjuti

hingga konfirmasi TMS.

Selain itu, BBPOM secara ketat menegakkan prinsip kerahasiaan identitas pelapor untuk melindungi whistleblower dari potensi intimidasi, sambil memastikan transparansi proses melalui update reguler via media sosial atau Mal Pelayanan Publik.

Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga terintegrasi dengan strategi sosialisasi luas melalui KIE, Pasar Pangan Aman, dan Bimtek, yang pada akhirnya mendukung capaian sampling over-target 100,5% (357 sampel) serta umpan balik pedagang yang melaporkan peningkatan penjualan hingga 50% berkat image aman. Dukungan fasilitas lab terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 dan 34 penguji memungkinkan analisis cepat, meskipun distribusi SDM perlu diperkuat di Aceh Timur, Langsa, dan Tamiang. Secara keseluruhan, keberhasilan SLA 100% ini mencerminkan sistem pengaduan yang adaptif, mendorong partisipasi masyarakat aktif dalam pengawasan pangan, dan berkontribusi pada ekosistem pangan Aceh.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB V
PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM di Banda Aceh) terhadap bahan makanan yang mengandung formalin di Kota Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan pengawasan telah berjalan cukup efektif, namun belum optimal secara menyeluruh.

1. Dari aspek pencapaian tujuan, pengawasan telah dilakukan secara terarah dan berbasis risiko dengan menyasar lokasi strategis seperti pasar, sekolah, dan momen tertentu (Ramadan, dll). Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada tahun 2025 temuan formalin sangat minim bahkan nihil.
2. Dari aspek integrasi (koordinasi), BBPOM telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi, edukasi, serta kerja sama dengan masyarakat dan pelaku usaha. Namun, masih terdapat kendala berupa belum optimalnya koordinasi lintas sektor serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan.
3. Dari aspek adaptasi, BBPOM telah menunjukkan kemampuan operasional yang cukup baik, didukung oleh SDM, laboratorium terakreditasi, serta penggunaan teknologi seperti rapid test kit.

Secara keseluruhan, efektivitas pengawasan BBPOM Aceh sudah menunjukkan hasil yang positif dalam menekan peredaran formalin, namun

masih menghadapi beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi yang belum optimal, serta rendahnya kesadaran masyarakat.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BBPOM Aceh

   Perlu meningkatkan jumlah dan pemerataan sumber daya manusia serta memperkuat wilayah kerja baru agar pengawasan dapat menjangkau seluruh daerah secara optimal.

2. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi

   BBPOM perlu meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait bahaya formalin, sehingga kesadaran dan kepatuhan dapat terus meningkat.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

   Masyarakat diharapkan lebih aktif berperan sebagai pengawas sosial dengan melaporkan temuan terkait bahan pangan berbahaya, mengingat pengawasan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian ini belum terlepas dari sejumlah keterbatasan metodologis maupun cakupan kajian. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada peneliti berikutnya untuk melakukan eksplorasi yang lebih mendalam terkait efektivitas pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

"Analisis Kadar Formalin Dan Uji Organoleptik Ikan Asin Dibeberapa Pasar Tradisional Di Kabupaten Tuban - Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University." Accessed January 29, 2026. http://etheses.uin-malang.ac.id/8252/.

Anggrahini, Sri. *Keamanan Pangan*. PT Kanisius, n.d.

Arifah, Agustina. *Analisis Kandungan Formalin Dalam Pangan Olahan Yang Beredar Di Pasar Seroja Kota Bekasi Secara Spektrofotometri Uv-Vis*. 2021.

"Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed January 29, 2026. https://kbbi.web.id/.

Bayani, Cinto, Devi Dwi Rahayu, Bintang Alya Binurika M, Laras Agesti Ayu, Linda Fitrianingsih, and Abdan Shofuh. "Kandungan Formalin Dan Boraks Pada Makanan Jajanan: Studi Literatur." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 14, no. 2 (2022): 82–90. https://doi.org/10.52022/jikm.v14i2.258.

Database Peraturan | JDIH BPK. "Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2023." Accessed January 29, 2026. http://peraturan.bpk.go.id/Details/284990/peraturan-bpom-no-22-tahun-%202023.

Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID]. "PP No. 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan." Accessed January 29, 2026. https://peraturan.go.id/id/pp-no-86-tahun-2019.

Duncan, Robert B. "Mltiple Decision-Making Structures in Adapting to Environmental Uncertainty: The Impact on Organizational Effectiveness." *Human Relations* 26, no. 3 (1973): 3. https://doi.org/10.1177/001872677302600301.

Duncan, Robert B. *Multiple Decision Making Structures in Adapting to Environmental Uncertainty: The Impact on Organizational Effectiveness*. Northwestern Univ., Graduate School of Management, 1972.

Efektivitas Pelaksanaan Unit Kerja Layanan (Ukl) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. With Evandes, Travolta. 2023. http://scholar.unand.ac.id/124722/1/Cover%20dan%20Abstrak.pdf.

Efektivitas Sistem Zonasi Dalam Penyetaraan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Banyumas. With SAVIRA, Balqis Ayu. 2020.

http://repository.unsoed.ac.id/6186/1/COVER-Balqis%20Ayu%20Savira-F1B016108-Skripsi-2020.pdf.

Ekowati, Dhiana, La Kamisi, Dewi Shinta, et al. *Pengantar Manajemen*. 2022.

Farmalkes, Setditjen. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan | Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan*. n.d. Accessed January 29, 2026. https://farmalkes.kemkes.go.id/unduh/permenkes-033-2012/.

Ferdhi, Gamal. "Efektivitas Program Ppm Di Kabupaten Halmahera Utara Oleh Pt Nusa Halmahera Minerals Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021." *Jurnal Sosial dan Humaniora* 9, no. 2 (2024): 145–59. https://doi.org/10.47313/pjsh.v9i2.3524.

Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Rajawali Press, 2020. https://digilib.uinsgd.ac.id/31676/.

HonestDocs. "Peran dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)." Accessed January 29, 2026. https://www.honestdocs.id/peran-dan-fungsi-bpom.

"IDENTIFIKASI FORMALIN PADA BABY CUMI (Loligo Sp) KERING | JoMLaT (Journal of Medical Laboratory Technology)." Accessed May 12, 2026. https://journal.poltekkesaceh.ac.id/index.php/jomlat/article/view/592.

"Identifikasi Kandungan Formalin Pada Tahu Putih Di Pasar Tradisional Airmadidi | Biofarmasetikal Tropis (The Tropical Journal of Biopharmaceutical)." Accessed January 29, 2026. https://journal.fmipaukit.ac.id/index.php/jbt/article/view/251.

"Intervensi Higiene Sanitasi Pada Pedagang Kaki Lima Untuk Mewujudkan Keamanan Pangan Di Kebayoran Baru, Jakarta | Wulandari | Jurnal Pengabdian Kesehatan Beguai Jejama." Accessed January 29, 2026. https://jpt.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/beguaijejama/article/view/9001/69.

Khalid, Abdul. "Efektifitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banda Aceh Terhadap Peredaran Obat Keras Di Kabupaten Aceh Utara." *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10 (November 2022): 413. https://doi.org/10.29103/sjp.v10i2.9136.

"Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) (Jilid 1-2) /Taliziduhu Ndraha | Perpustakaan Universitas Terbuka." Accessed February 4, 2026. https://opac.ut.ac.id/detail-opac?id=17145.

Laduni, Rizki Revashandi Ihsan, and Sri Wibawani. "Efektivitas Pelayanan Program Kartu Identitas Anak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Di Kelurahan Wonokromo." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 13, no. 2 (2023): 149–57. https://doi.org/10.33592/jiia.v13i2.4305.

Launde, Agata Pransiska, Novie Pioh, and Welly Waworundeng. "Tugas Dan Fungsi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Melindungi Kesehatan Masyarakat Di Kota Manado (Studi Kasus Tentang Penggunaan Bahan Makanan Berbahaya Di Kota Manado)." *Jurnal Eksekutif* 2, no. 5 (2020). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/29457.

"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RD - 2017." Accessed January 29, 2026. https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/206060/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-r-d.html.

M.Si, Dr H. Zuchri Abdussamad, S. I. K. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.

M.Si, Dr Ir Wisnu Cahyadi. *Analisis & Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*. Bumi Aksara, 2023.

Pengaruh Formula Gel Nanofitosom Fraksi Etil Asetat Jahe Merah (Zingiber officinale Linn. var. rubrum) Terhadap Aktivitas Antiinflamasi pada Mencit Putih Jantan. With Putri, Intani Julien. 2025. http://scholar.unand.ac.id/491481/1/Cover%20dan%20Abstrak.pdf.

"Profil | Balai Besar POM Di Banda Aceh." Accessed April 24, 2026. https://aceh.pom.go.id/profil.

"Profil | Balai Besar POM Di Banda Aceh." Accessed April 27, 2026. https://aceh.pom.go.id/profil.

Rachman, Arif, Elisha Yochanan, Andi Samanlangi, and Hery Purnomo. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 2024.

"Robbins, S.P. and Coulter, M. (2016) Management. 13th Edition, Pearson Education Limited, Harlow. - References - Scientific Research Publishing." Accessed February 4, 2026. https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2647309.

Sari, Ayu Nirmala. "Analisis Kandungan Formalin Dan Methanyl Yellow Pada Mie Kuning Di Kota Banda Aceh." Accessed January 29, 2026. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5614061.

Scribd. "Duncan (1973) | PDF." Accessed April 28, 2026. https://www.scribd.com/document/357129888/Duncan-1973.

"Sosialisasi Jenis-Jenis Makanan Yang Tidak Baik Untuk Diperjualbelikan Di Pasar Perumnas Kota Mataram | Eastasouth Journal of Effective Community Services." Accessed January 29, 2026. https://ejcs.eastasouth-institute.com/index.php/ejecs/article/view/389.

Steers, Richard M. *Efektivitas organisasi (Kaidah peri laku)*. Penerbit Erlangga, 1980.

Syahza, Almasdi. *Metodologi Penelitian*. 2016.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. *Manajemen publik*. Grasindo, 2005.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. *Manajemen publik*. Grasindo, 2005.

"Teori Organisasi | PDF." Accessed January 23, 2026. https://www.scribd.com/document/451628500/Teori-Organisasi.

Wahongan, Simbala. "Strategi Mewujudkan Keamanan Pangan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen." *LEX ET SOCIETATIS* 9, no. 3 (2021). https://doi.org/10.35796/les.v9i3.36435.

LAMPIRAN

Surat keputusan Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2664/Un.08/FISIP/Kp.07.6/09/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **23 September 2025**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara:
Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.
Untuk membimbing skripsi:
Nama : **Intan Tarisa**
NIM : 220802075
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Efektivitas BPOM Aceh Terhadap Pengawasan Bahan Makan yang Mengandung Formalin di Kota Banda Aceh

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 September 2025
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN,

MUJIL MULIA

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Surat Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-210/Un.08/FISIP.I.05/02/2026
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM	: 220802075
Nama	: INTAN TARISA
Program Studi/Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Alamat	: Jln.tgk malem,Ds.Dham Pulo,Ingin Jaya,kab.Aceh Besar Wakil RAJA -

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***EFEKTIVITAS BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) ACEH TERHADAP PENGAWASAN BAHAN MAKAN YANG MENGANDUNG FORMALIN DI KOTA BANDA ACEH***

Banda Aceh, 30 April 2026
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

Surat Telah Melakukan Penelitian

BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beuereuh No. 110 Banda Aceh 23126
(0651) - 22845, Fax : (0651) - 22735
Email : bpom_aceh@pom.go.id ; Website : https://aceh.pom.go.id/

Nomor : B-OT.03.03.1A.04.26.310 Banda Aceh, 22 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Permohonan Informasi Publik

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di Banda Aceh

Sehubungan dengan permohonan informasi Saudara Nomor Surat B-210/Un.80/FISIP.I.05/02/2026 Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) perihal Permintaan Informasi Publik, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggapan Permintaan Informasi Terkait Efektivitas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh Terhadap Pengawasan Bahan Makan Yang Mengandung Formalin di Kota Banda Aceh telah selesai dilakukan dengan cara pengambilan data dan wawancara oleh Ketua Tim Fungsi Infokom
2. Dengan pengambilan data dan wawancara tersebut menyatakan bahwa proses permintaan informasi/data a.n Intan Tarisa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry telah selesai dengan keputusan dikabulkan sepenuhnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh

Selaku PPID Pelaksana,

Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH
Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beuereuh No. 110 Banda Aceh 23126
(0651) - 22845, Fax : (0651) - 22735
Email : bpom_aceh@pom.go.id ; Website : https://aceh.pom.go.id/

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Nomor : B-OT.03.03.1A.04.26.295

Berdasarkan permintaan informasi pada tanggal 21 bulan April tahun 2026 dengan nomor pendaftaran* BDA-21042026-001, kami menyampaikan kepada Saudara/i :

Nama : Intan Tarisa
Alamat : Gampong Dham Pulo
No. Telp/*Email* : 082213679133

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi Dapat Diberikan

No.	Hal-hal Terkait Informasi Publik	Keterangan	
1.	Penguasaan Informasi Publik**	☑ Kami ☐ Badan Publik lain, yaitu…..	
2.	Bentuk fisik yang tersedia**	☑ *Softcopy* (termasuk rekaman) ☑ *Hardcopy*/Salinan tertulis	
3.	Biaya yang dibutuhkan***	☐ Penyalinan	Rp. - x 0 (jumlah lembaran) = Rp. -
		☐ Pengiriman	Rp. -
		☐ Lain-lain	Rp. -
4.	Waktu penyediaan	7 hari	
5.	Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon**** (tambahkan kertas bila perlu)		

B. Informasi Tidak Dapat Diberikan karena:**

☐ Informasi yang diminta belum dikuasai
☐ Informasi yang diminta belum didokumentasikan

Penyediaan informasi yang diminta belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu 7 hari kerja*****

Banda Aceh, 22 April 2026
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Balai Besar POM di Banda Aceh

Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc.

Keterangan :

* Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permintaan Informasi Publik
** Pilih salah satu dengan memberi tanda (☑).
*** Biaya penyalinan (fotokopi) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah disiapkan
**** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya
***** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

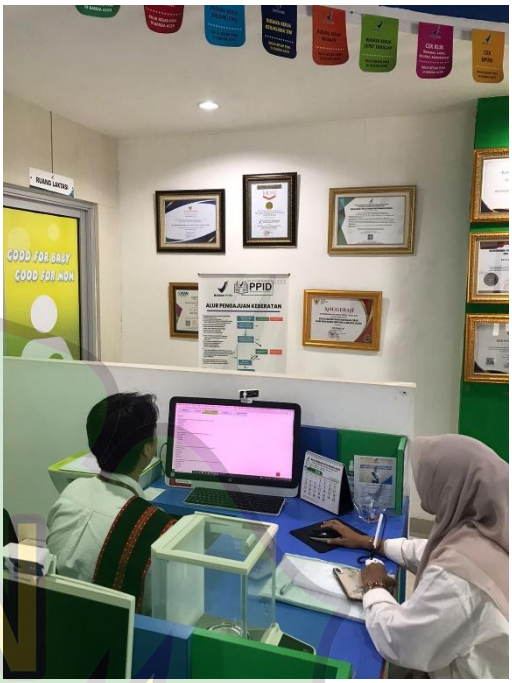

Gambar 1, wawancara dengan pihak BPOM

Gambar 2, wawancara dengan pedagang

Gambar 3, Kantor BBPOM Aceh

Gambar 4. Wawancara dengan pedagang

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh

No	Nama File	Link File
1	Laporan Kinerja BPOM Aceh Tahun 2025	Klik disini
2	Laporan Kinerja BPOM Aceh Tahun 2024 Revisi	Klik disini
3	Laporan Kinerja BPOM Aceh Tahun 2024	Klik disini
4	Laporan Kinerja BPOM Aceh Tahun 2023	Klik disini
5	Laporan Kinerja BPOM Aceh Tahun 2022	Klik disini
6	Laporan Kinerja BPOM Aceh Tahun 2021	Klik disini
7	Laporan Kinerja BPOM Aceh Tahun 2020	Klik disini
8	Laporan Kinerja BPOM Aceh Tahun 2019	Klik disini

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Intan Tarisa

Tanggal Lahir : 4 Oktober 2003

No Hp : 082213679133

Alamat : Jln,Teungku Cot Malem, Gampong Dham Pulo Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Ingin Jaya

Email : intantarisaaa@gmail.com

Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN Dham Ceukok

SMP : SMPN Negri 3 Ingin Jaya

SMA : SMAN1 Ingin Jaya

Mahad	: 81	(2024)	Ma' had Jami' ah
Toefel	: 400	(2026)	Pusat Bahasa Uin Ar Raniry
Komputer	: B-	(2023)	ICT Uin Ar Raniry
Magang	:A	(2025)	Balai Pelestarian Kebudayaaan Aceh